

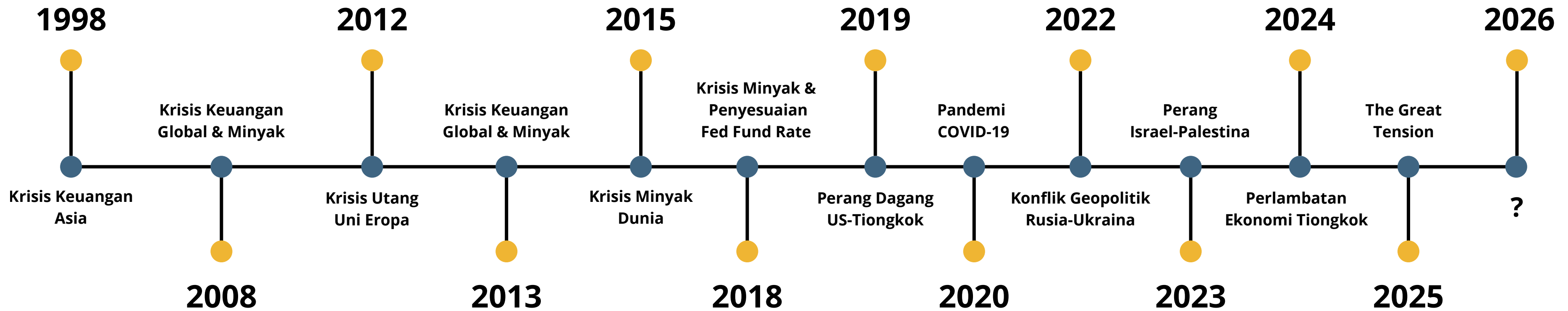
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026

“Strategi Sektor Keuangan
Mendukung Pemerataan Ekonomi”

Dr. Aviliani
Ekonom Senior INDEF



Kepastian Adalah Ketidakpastian Itu Sendiri



- Sepanjang 2008-2019, gejolak ekonomi dunia sumber dari sektor keuangan, energi, maupun perdagangan. Krisis-krisis tersebut tidak begitu nyata menekan sisi permintaan dan penawaran (demand and supply). Satu hal misalnya, sektor pariwisata masih tetap bergerak pada periode krisis tersebut.
- Tantangan perekonomian ke depan adalah “The Great Tension” yang menjadi masa penentuan terjadinya “The Great Reset”.
- Berbagai krisis yang terjadi membuat Indonesia semakin inovatif dan kreatif sehingga cukup mudah untuk adaptif menanggapi berbagai krisis yang terjadi dalam 2 dekade terakhir, namun akan seberapa kuat kita dapat menavigasi berbagai krisis ke depan?.

Perlambatan Ekonomi Global 2025

**Proyeksi
Pertumbuhan
Ekonomi
2025-2026**

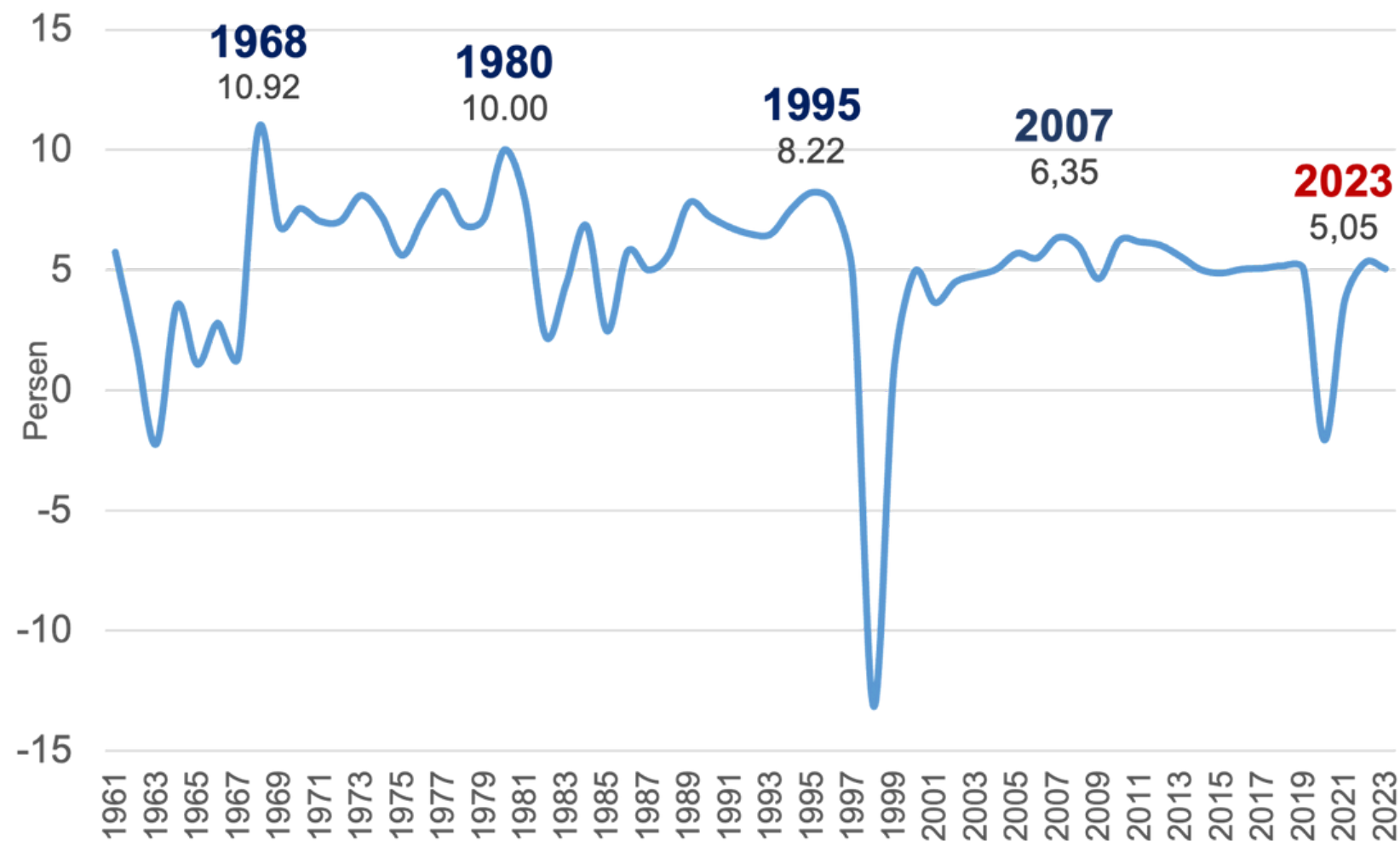


Wilayah	IMF				World Bank			
	2025e	2025F	2025F*	2026F	2024	2025F	2025F*	2026F
Global	3.3	3.2	3.0 ↓	3.0	2.8	2.7	2.3 ↓	2.4
Negara Maju	1.8	1.8	1.5 ↓	2.0	1.7	1.7	1.2 ↓	1.2
Negara Berkembang	4.3	4.2	3.9 ↓	4.0	4.2	4.1	3.8 ↓	3.8
Amerika Serikat	2.8	2.2	1.7 ↓	2.0	2.8	2.5	1.4 ↓	1.6
Uni Eropa	1.1	1.2	1.5 ↓	2.0	0.9	1.0	0.7 ↓	0.8
Tiongkok	5.0	4.5	4.0 ↓	4.0	5.0	4.5	4.5 —	4.0
India	6.5	6.5	6.3 ↓	6.0	6.5	6.7	6.3 ↓	6.5

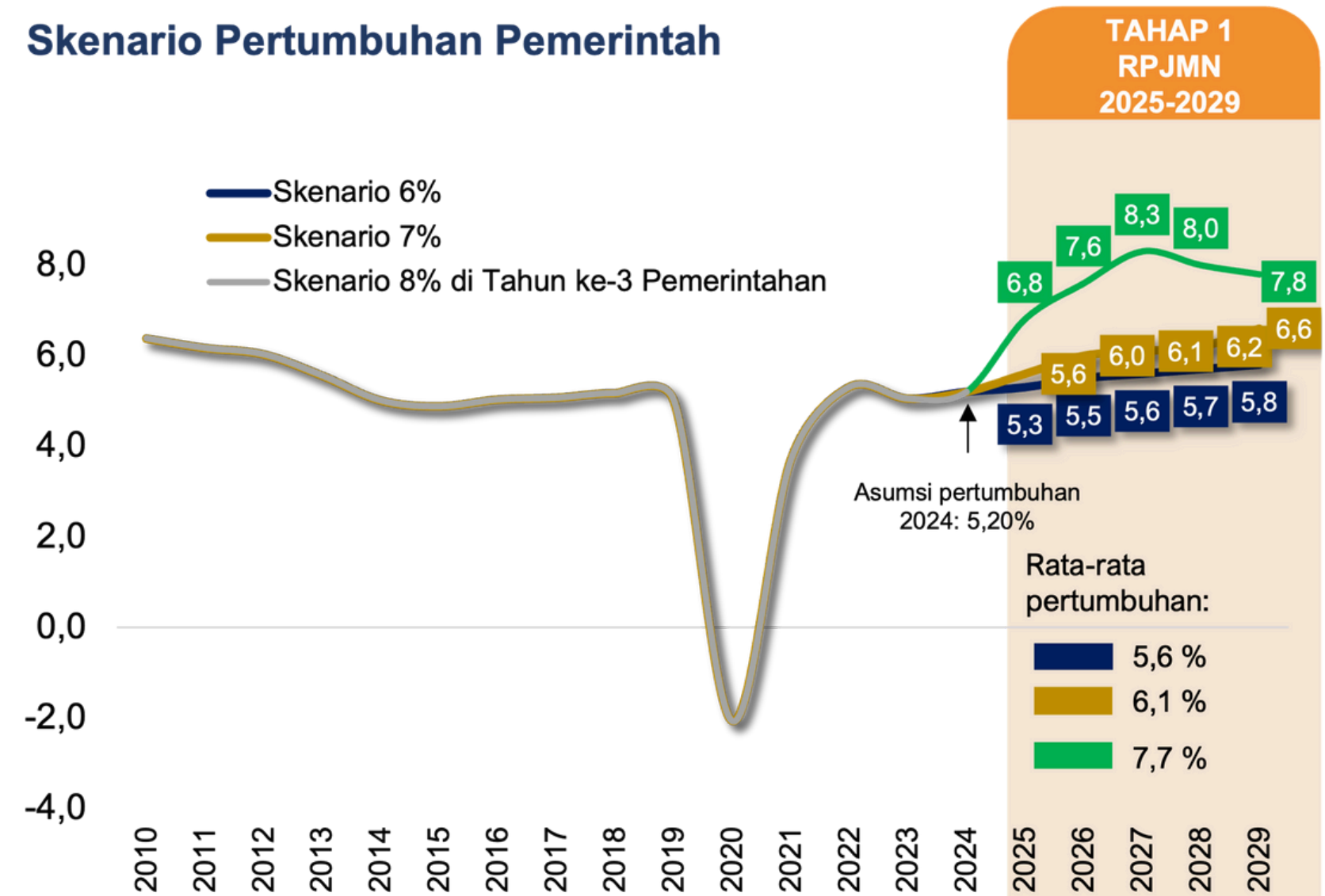
- Perekonomian global diperkirakan melambat, baik di negara berkembang maupun negara maju (walaupun telah direvisi ke atas pasca adanya kepastian Tarif Trump).
- Tantangan global yang semakin dinamis menjadi tantangan di tahun mendatang diantaranya transisi kebijakan di lebih dari 60 negara termasuk Amerika. Rencana Presiden Donald Trump yang lebih inward-looking policy telah memengaruhi kinerja perdagangan global.
- Eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah seperti Timur Tengah, Asia, dan Eropa menambah dinamika ekonomi dan politik di masa akan datang.
- Lambatnya pemulihan ekonomi Tiongkok diperkirakan akan turut mempengaruhi kinerja ekonomi global mendatang, melalui pelemahan permintaan barang dan jasa dari negara tersebut.

Skenario Indonesia Keluar Dari Middle Income Trap

Pertumbuhan Ekonomi 1961-2023



Skenario Pertumbuhan Pemerintah



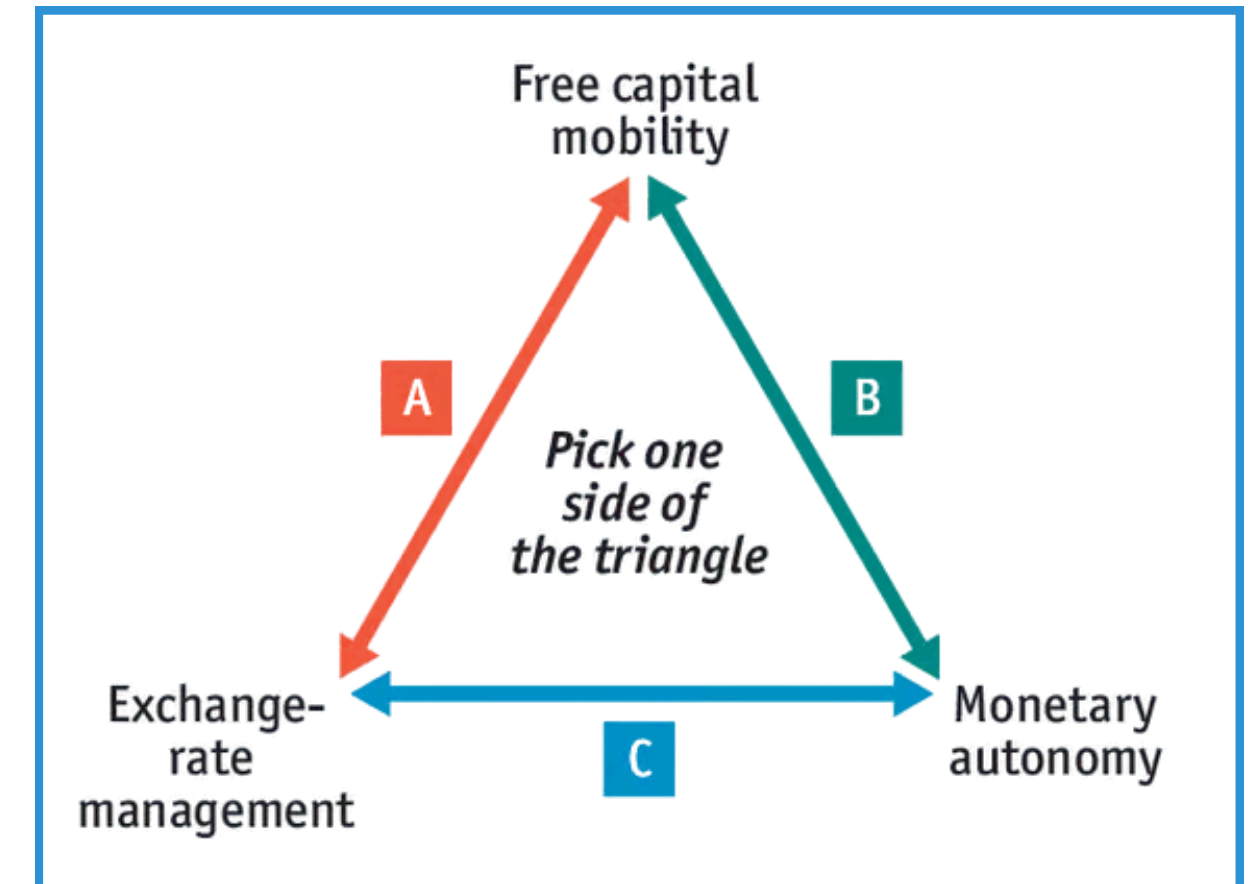
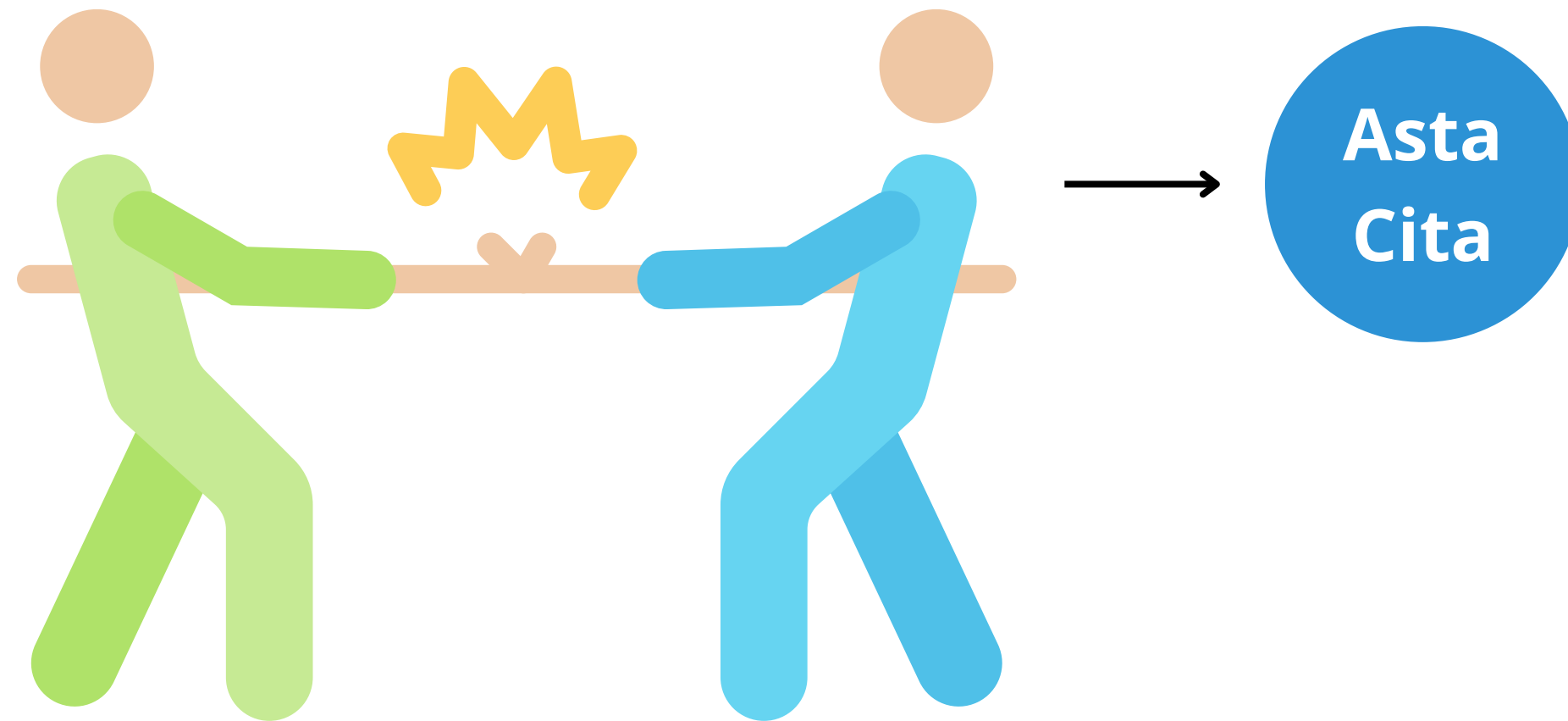
- Ekonomi sulit untuk tumbuh di atas 5 persen tanpa ada langkah transformatif
- Dalam 20 tahun terakhir, perekonomian Indonesia rata-rata hanya tumbuh 4,8 persen
- Pertumbuhan ekonomi tertinggi di 2007 sebesar 6,35 persen dalam kurun waktu 2 dekade terakhir

Dalam rangka mencapai target perekonomian 8 persen, maka dalam beberapa tahun ke depan hingga tahun 2029. Perekonomian Indonesia diharapkan tumbuh 5-7%

Kebijakan Moneter: Pro Stability atau Pro Growth?

Pro-Stability

Pro-Growth



Keseimbangan Stabilitas & Pertumbuhan

- Indonesia menghadapi tarik-menarik antara menjaga stabilitas (inflasi rendah, kurs stabil, fiskal sehat) dan mendorong pertumbuhan tinggi (investasi, industrialisasi, lapangan kerja).

Trilemma Kebijakan

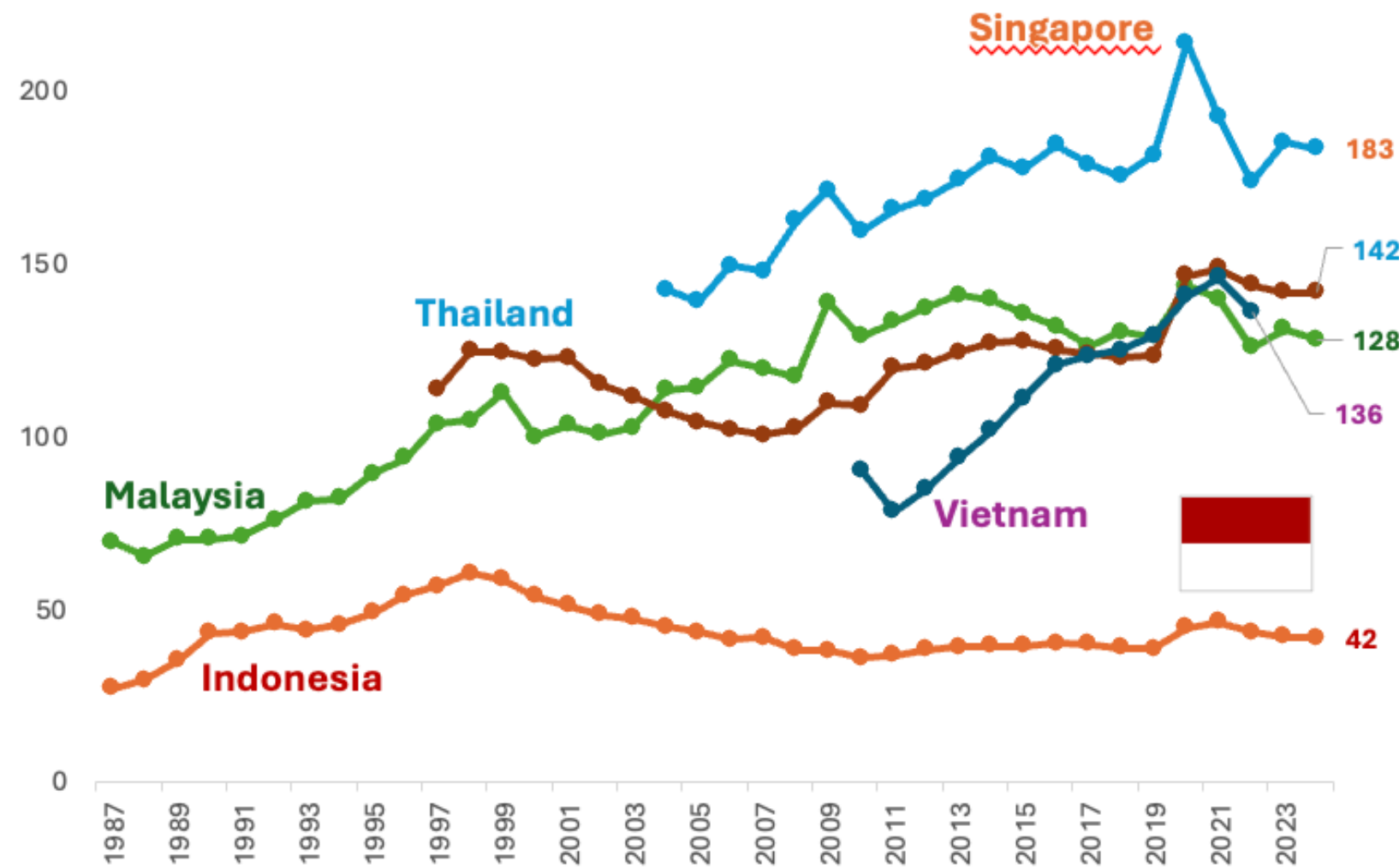
- Dalam Impossible Trinity, Indonesia tidak bisa sekaligus menjaga kurs stabil, mobilitas modal bebas, dan otonomi moneter. Harus ada kompromi kebijakan untuk menopang pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas.

Asta Cita & Target 8%

- Asta Cita menjadi panduan menyeimbangkan pro-stability dan pro-growth, melalui pembangunan SDM, ekonomi berkelanjutan, dan tata kelola baik agar ambisi pertumbuhan 8% tercapai dengan fondasi yang kokoh.

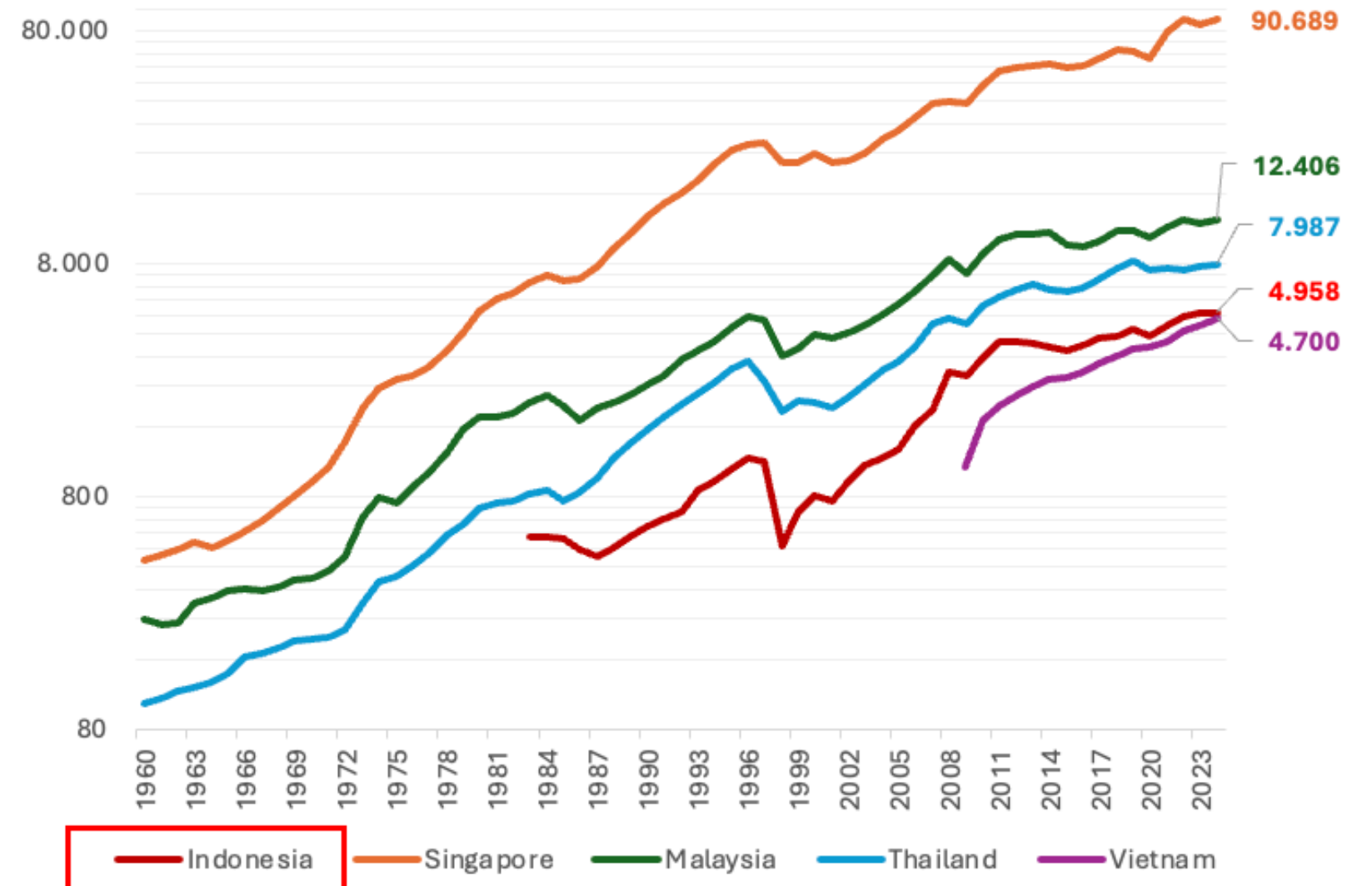
Kesejahteraan Rendah Karena Uang Beredar Rendah

Broad Money (% of GDP)



Sumber: IMF Database (2025)

GDP per Capita (Current US\$)



Sumber: IMF Database (2025)

Dalam substansi yang serupa, peran sektor keuangan dalam membentuk produk domestik bruto Indonesia masih minim. Minimnya peran sektor keuangan terhadap produk domestik bruto (PDB) ditunjukkan oleh data rasio broad money (M2) terhadap PDB Indonesia yang menempati posisi terendah, yaitu sebesar 42% pada tahun 2023.

Kebijakan Moneter Dapat Mendukung Fiskal & Sektor Riil

Fiscal and Monetary Policy Interaction Post Indonesian Institutional Transformation: Vector Autoregression Approach

Ariadne Mael Novariani Putri^{a*}, Sri Yani Kusumastuti^b

Abstract

A consensus to separate fiscal and monetary authority emerged to achieve optimal macroeconomic conditions through credible policy. This paper aims to analyze the interaction between fiscal-monetary policy after the Indonesian institutional transformation in 1999 and its impact on GDP. Using the Vector Autoregression approach, this study utilizes seven variables from 1999 Q2 – 2019 Q4: government revenue, spending, and financing as fiscal policy variables; interest rate and money supply as monetary policy variables; GDP as a macroeconomic variable; and CPI to deflate all variables.

This study showed that fiscal and monetary policy in Indonesia tends to have a mixed interaction: the fiscal and monetary authorities not only jointly implement the same expansionary or contractive policy but also mutually substitute or implement opposing policies simultaneously. In terms of interactions with GDP, fiscal policy showed a stronger and more direct influence than monetary policy. Increasing government spending and money supply while reducing or maintaining the stability of government revenues, government financing, and interest rates is the best policy mix to support GDP growth in the short run. In the long run, all variables in the study, except money supply, support GDP growth. The results emphasize strengthening policy framework and coordination to achieve optimal GDP growth.

Keywords: Fiscal Policy; Monetary Policy; GDP Growth; Policy Interaction

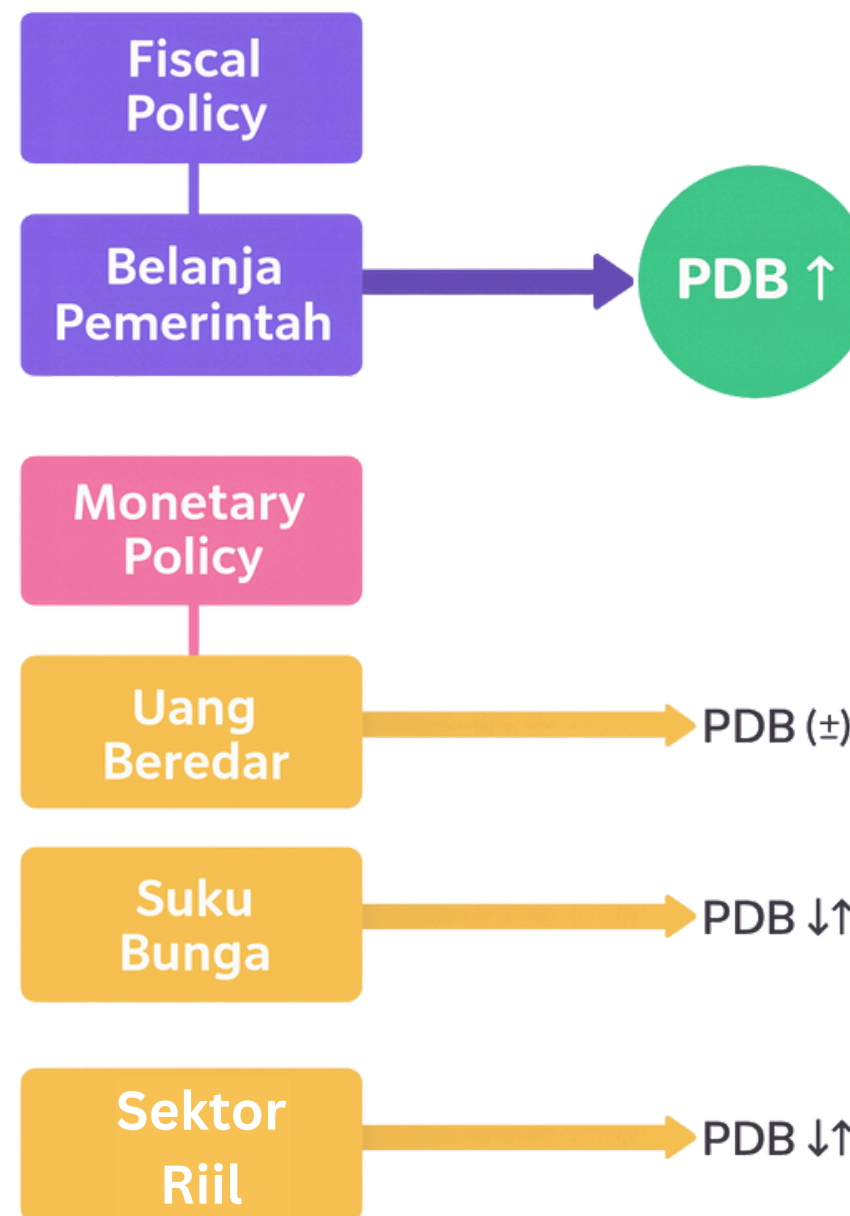
JEL Classification: E52, E60, E62, E63

1. INTRODUCTION

The opinion of classical economists who rejected the role of authority in intervening in the economy (*laissez-faire*) faced a challenge when the Great Depression hit the United States in 1929. This depression became a starting point for Keynesian economics development, which emphasized the important role of authorities in directing the economy to its intended condition. The consensus to separate fiscal and monetary policy authorities began to develop in 1990 to maximize efforts to achieve economic growth at a stable price level (Alcidi & Thirion, 2016). This separation was also done to minimize the potential for the fiscal authority to influence the monetary authority's policies to fund government expenditures (Jazbec & Banerjee, 2017).

As an initial response to restore economic conditions after the 1997/1998 financial crisis, institutional transformation in Indonesia began in 1999. The transformation was first carried out by separating fiscal and monetary authorities through Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia. This law reinforces the role of Bank Indonesia as an independent Central Bank focusing on determining monetary policy. The institutional transformation from the fiscal side was carried out through fiscal decentralization by the mandate of Law Number 25 of 1999 concerning the Financial Balance between

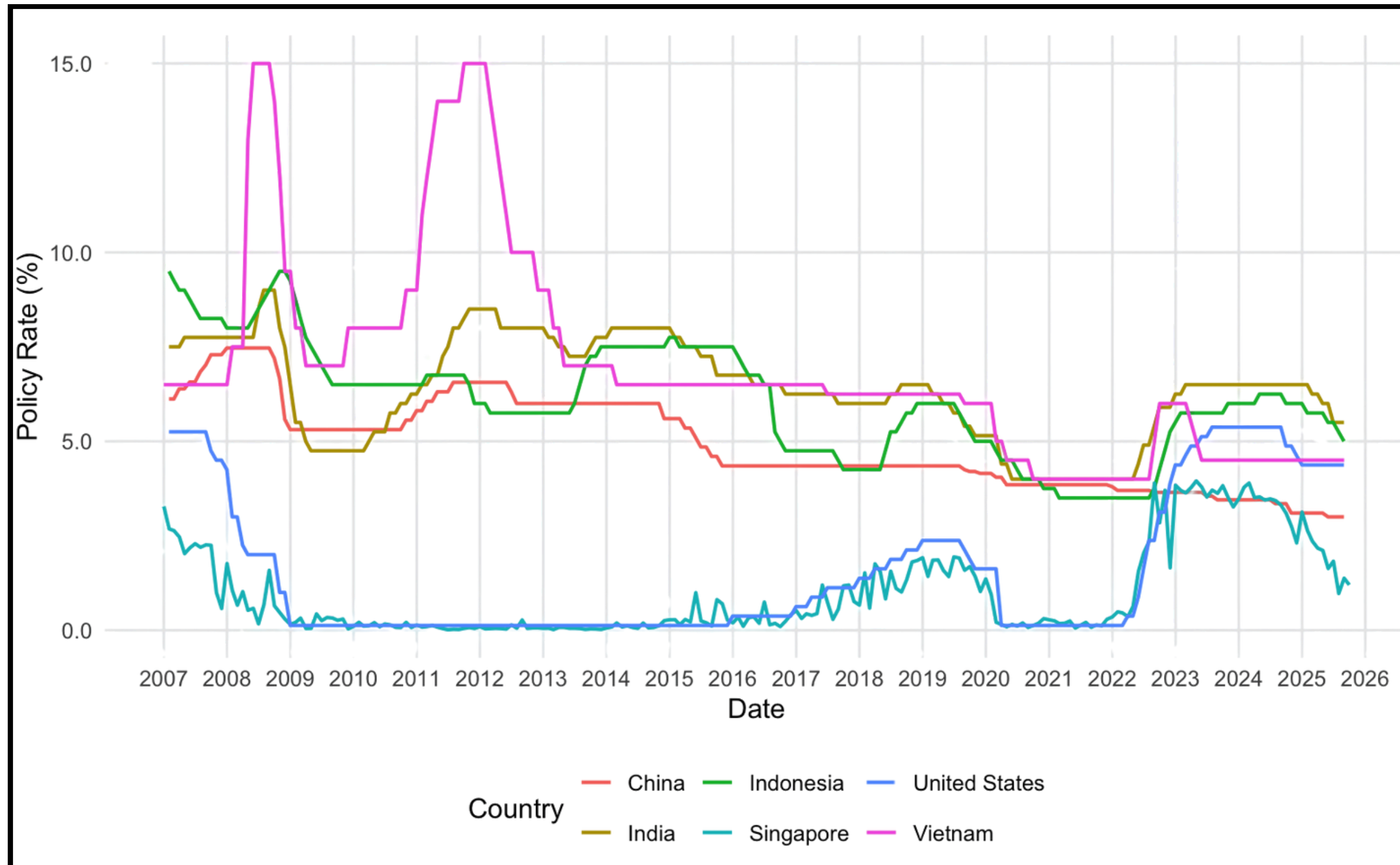
©2022 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI



Key Takeaways

- Fiskal lebih dominan dalam memengaruhi pertumbuhan PDB dibanding moneter.
- Belanja pemerintah harus diarahkan ke sektor produktif agar efek penggandanya maksimal.
- Koordinasi fiskal-moneter penting, khususnya dalam pengelolaan suku bunga, jumlah uang beredar, dan pembiayaan.
- Namun, independensi Bank Indonesia tetap dijaga untuk menjaga kredibilitas kebijakan

Era Suku Bunga Tinggi Mulai Ditinggalkan Banyak Negara



- Interest rate tinggi → cost of fund naik karena bank harus menawarkan bunga lebih besar untuk menarik dana pihak ketiga.
- Yield SBN ikut naik, sehingga biaya pinjaman pemerintah juga lebih mahal.
- Akibatnya, baik sektor publik maupun swasta menghadapi beban pembiayaan yang lebih berat, berpotensi menekan investasi dan pertumbuhan.

Kompleksitas Perekonomian dan Emas Sebagai Sinyal Resesi

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

🕒 30 October 2025

POLITICS

Government shutdown set to become longest ever after latest Senate vote fails

Kemungkinan FFR
Cut Rate Nov-2025

37,5%

—
0 BPS

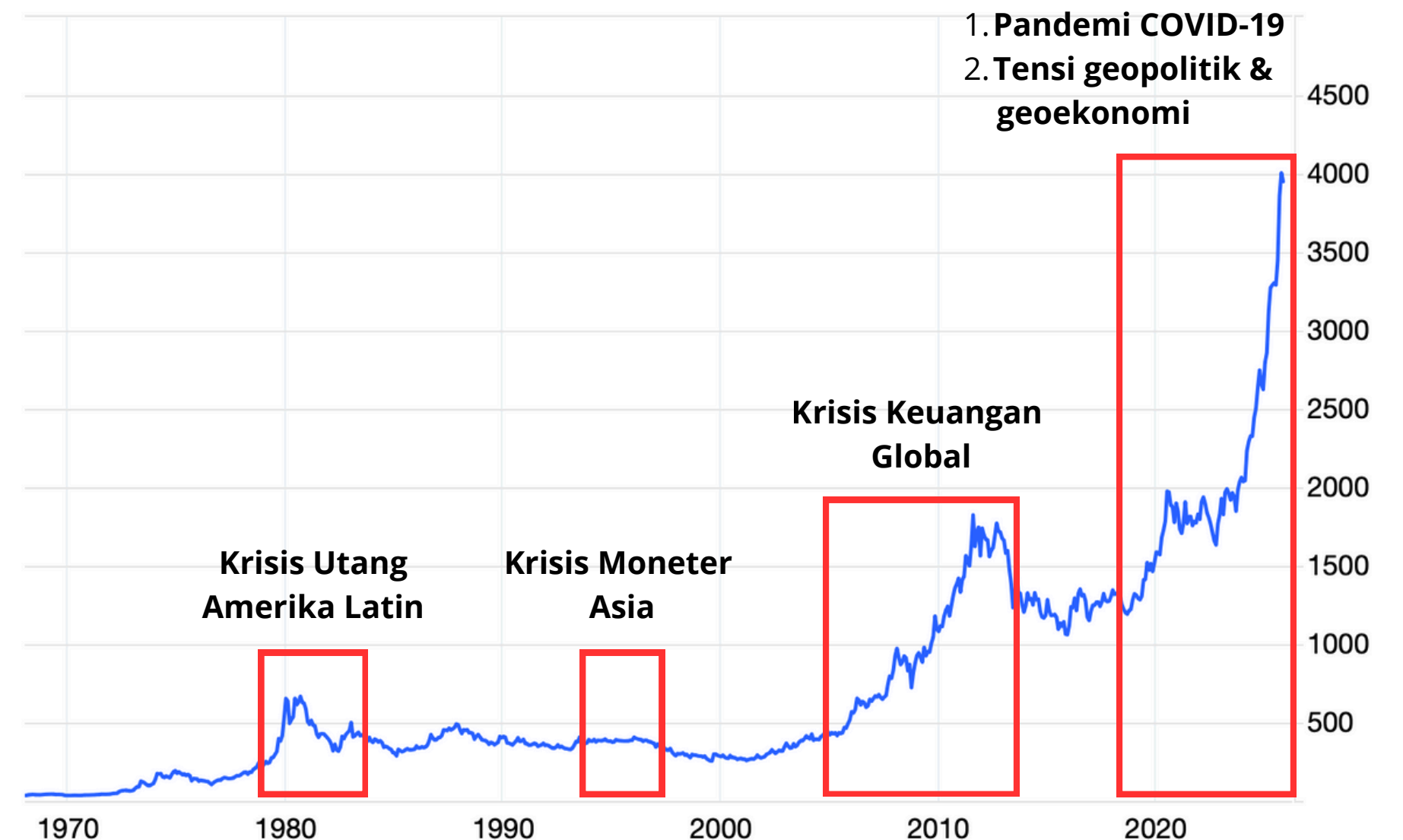
Kemungkinan FFR
Cut Rate Des-2025

70%

↓
25 BPS

Global gold demand rises to quarterly all-time high in Q3

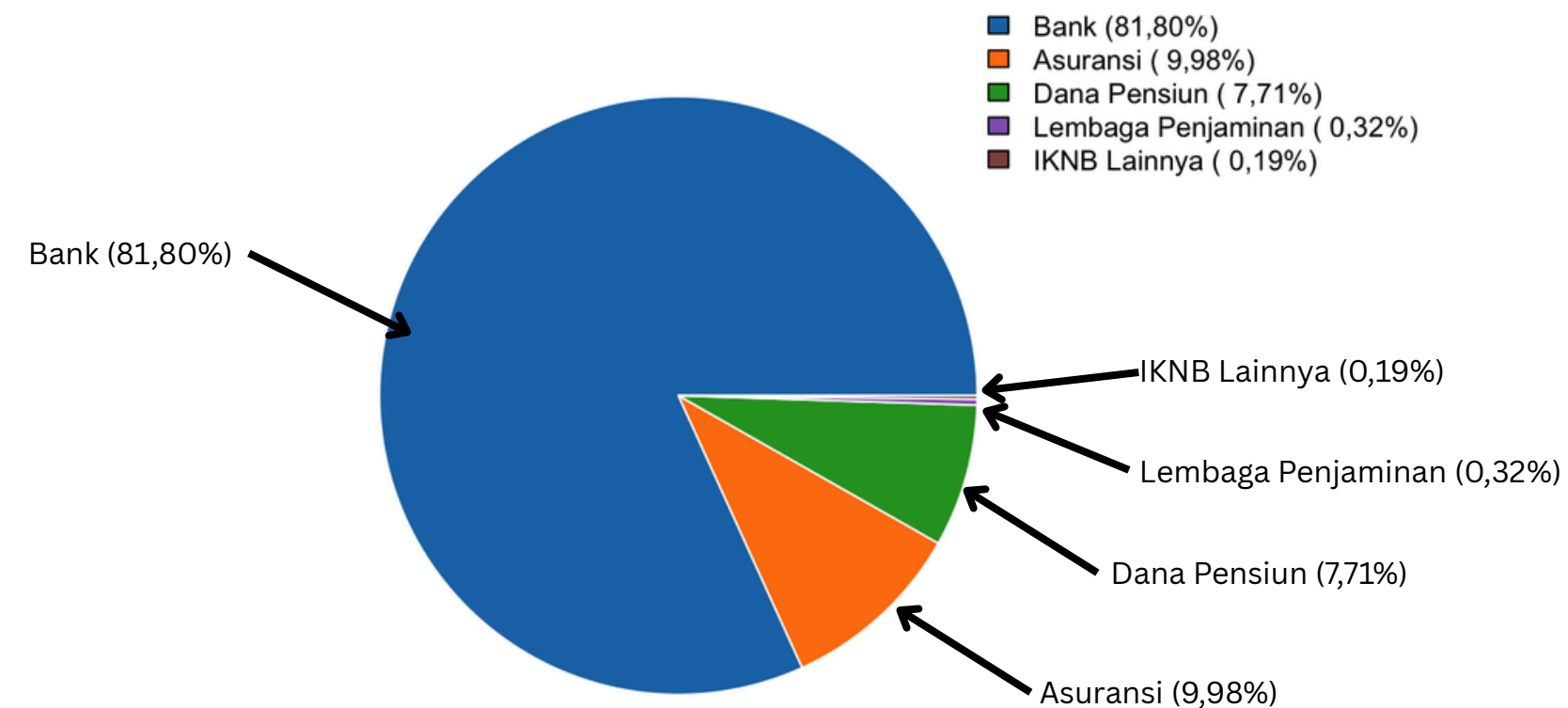
Total demand up 3% in 3rd quarter to 1,313 tons, driven by increased investment demand, central banks' purchases, World Gold Council says



Perbankan Tidak Menjadi Sumber Utama Pembiayaan

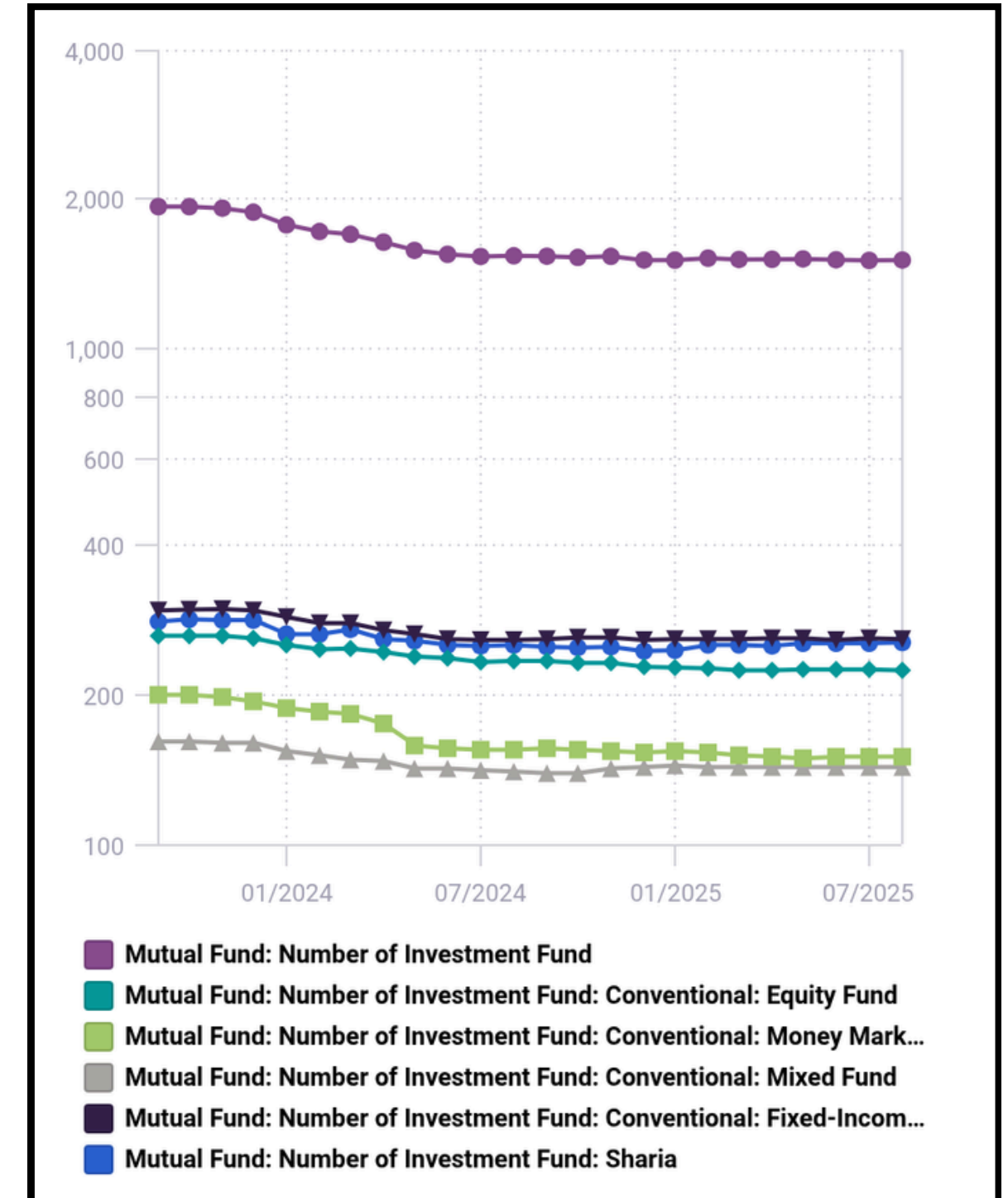
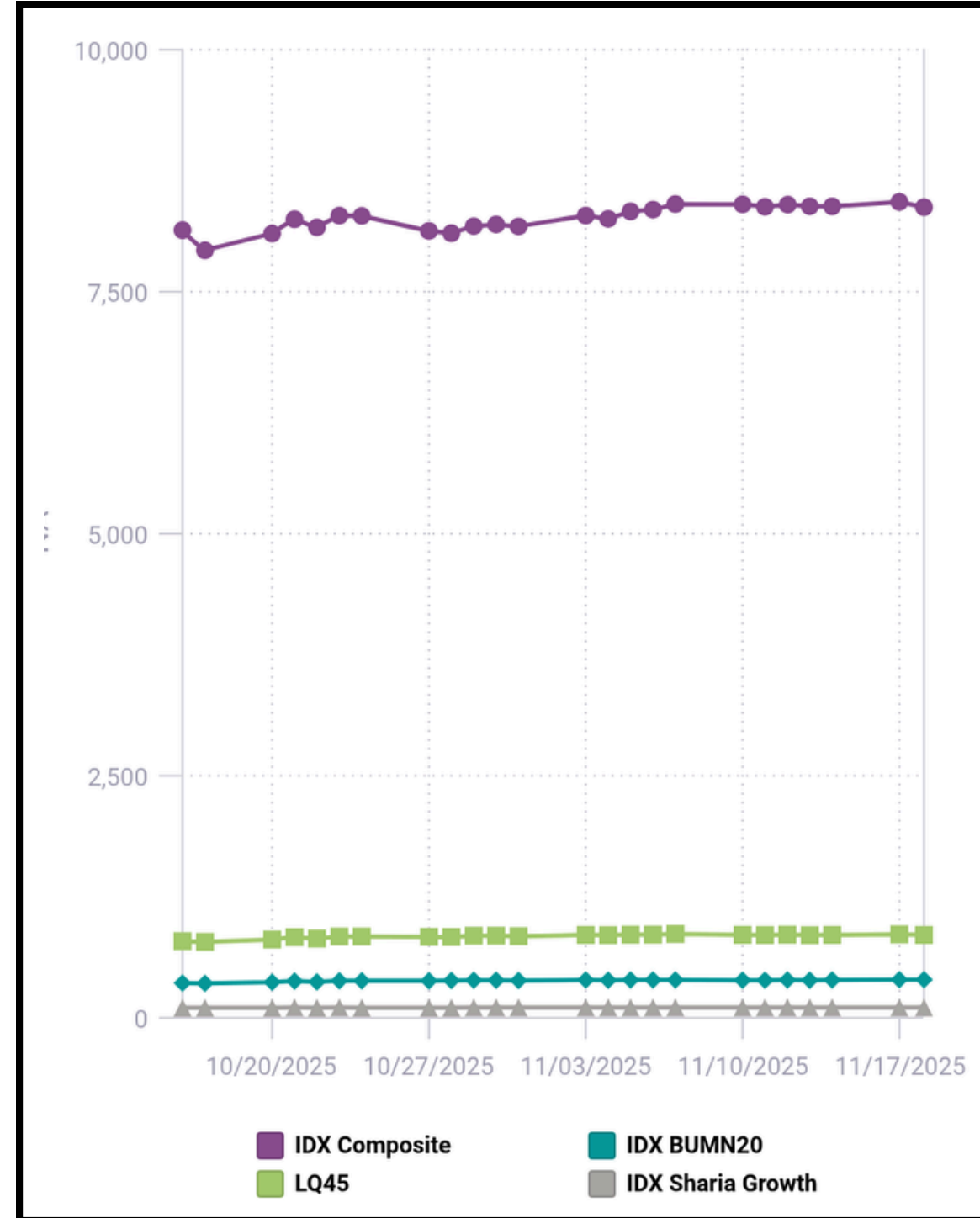
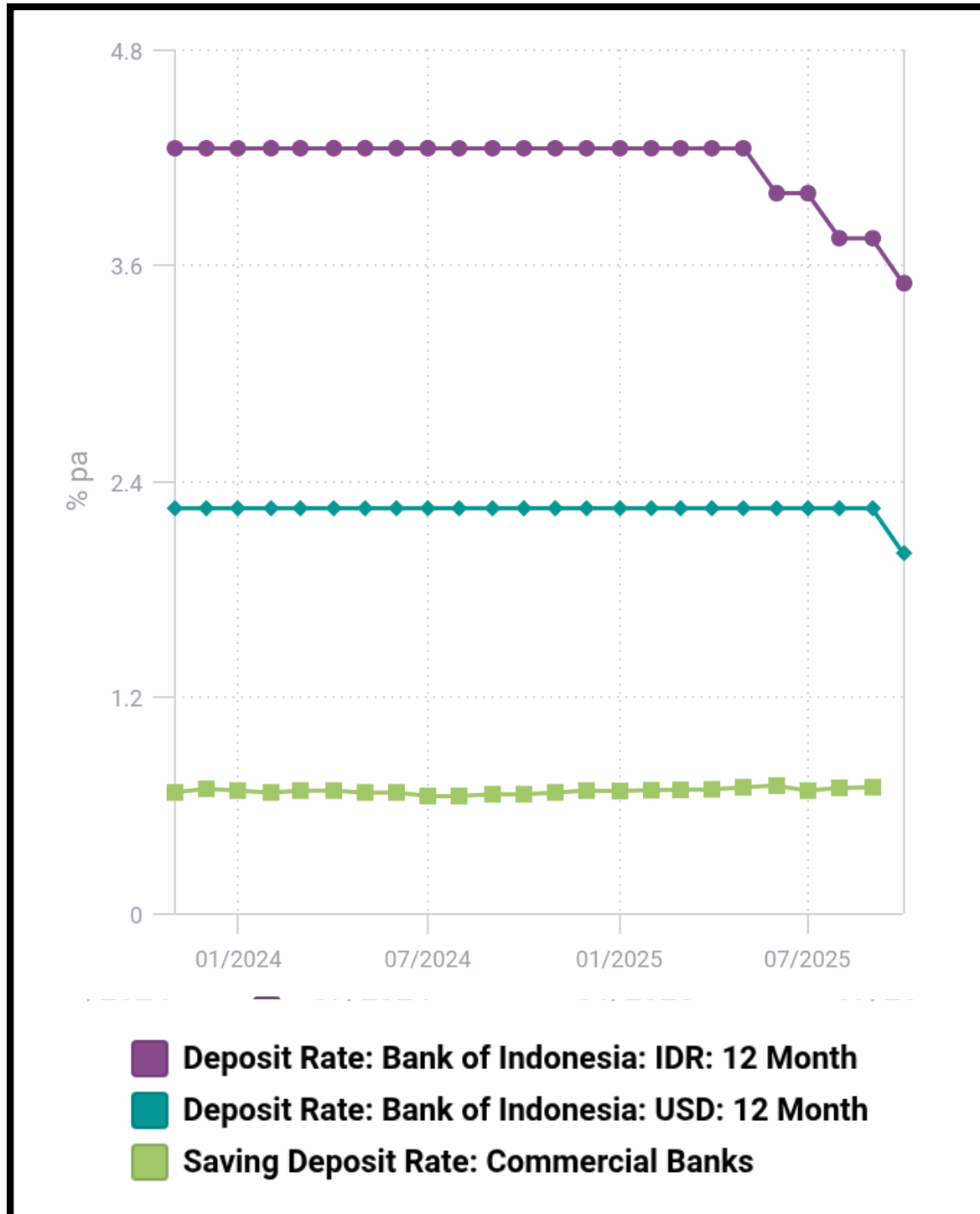
Profil Aset Sektor Keuangan: Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Data per Juli 2025

Komposisi Lembaga Keuangan



- Berdasarkan diagram yang Anda tunjukkan, terlihat bahwa pembiayaan saat ini masih sangat didominasi oleh bank. Namun, sebenarnya pembiayaan tidak hanya bersumber dari perbankan, melainkan juga dari berbagai instrumen dan lembaga lain.
- Untuk mendorong pendalaman keuangan, diperlukan inovasi produk yang bersifat jangka panjang yang dapat menjadi diversifikasi instrument yang lebih luas bagi portofolioinvestasi IKNB yang dapat mengakomodir risk appetite yang bervariasi.

Kinerja Instrumen Keuangan Mengalami Perlambatan



Pilihan instrumen keuangan baik deposito dan reksadana secara keseluruhan bergerak dalam tren penurunan return (yield), maka hal ini berpotensi adanya penurunan hasil dari investasi yang di investasikan oleh investor. Hanya Pasar Saham yang bergerak dalam tren peningkatan dimana mencapai All Time High Phase.

Injeksi Likuiditas Dari SAL & SILPA Perlu Dilakukan

The Focal Point



The liquidity consequences of the fiscal-fuelled growth

29 January 2024

Lazuardin Thariq Hamzah
lazuardin.hamzah@bca.co.id

Barra Kukuh Mamia
barra.mamia@bca.co.id

Summary

- Fiscal expansions in Q4 2023 translated positively to the GDP growth number, as transfer payments managed to sustain the consumption growth in lower-income households while the business sector continued to show a strong appetite for expansion.
- The banking sector continues to face limited deposit growth despite the surge in government spending, as the limited trickle-up effect from following the disbursement of fiscal handouts fails to compensate for the decline in household income.
- Despite its positive impact on growth, continued spending by the public and business sectors may not help to strengthen the Rupiah.



Scan for the link to our report depository

- As noted in our previous reports, the market's interest rate expectation pendulum has been swinging left and right throughout the past week. In the midweek, the FOMC seems to be successful in pushing back the narrative for a QT taper and a March 2024 rate cut, but the renewed fears of a US banking crisis are in line with the dovish scenario of the overeager market. Moving closer to the weekend, the hot US non-farm payroll data (353,000 in January 2024 vs 180,000 forecasts) released on Friday calmed down the Fed pivot camp. But Fed Chairman Jerome Powell's dovish statement in a taped interview aired on Sunday swung the pendulum back to the side of monetary policy loosening again.
- Luckily, the Indonesian financial market continues to welcome more foreign investors

despite this fast-swinging pendulum of global interest rate expectations. The Rupiah regained some of its value in the past week, while the domestic stock market recorded around USD 276.41 Mn in foreign net buys. Meanwhile, foreign investors continue to find hard times getting back to the SBN market, but the benchmark 10Y yield is still languishing on the low 6.5-6.6% level thanks to the declining supply (*see Chart 1*).

- The question, then, is for how long the Indonesian financial market could strut along despite the uncertain global and domestic conditions. Indonesian corporates' low forward P/E (relative to the 2022-2023 average) may attract investors given the potential for a dividend play, while the still-high amount of liquidity in the public sector

Kompas.com / Money / Ekbis

Suntik Himbara Rp 200 T, Menkeu Purbaya: Tak Lama Lagi Kita Akan Lihat Ekonomi Lebih Bergairah

- Ekspansi fiskal Q4 2023 berhasil menopang pertumbuhan ekonomi dan menjaga momentum investasi.
- Namun, belanja Pemerintah belum optimal mendukung sektor riil dan cukup banyak dana mengendap di daerah, misalnya APBD yang mengendap di BPD (Agustus 2025: Rp233,11 T).
- Pemerintah dapat mengajak diskusi dunia usaha (swasta) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Strategi Penempatan Dana SAL & SILPA Ke Bank Himbara

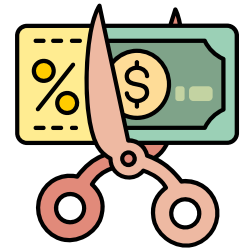
Nama Bank	Alokasi Kluster 1 (triliun rupiah)	Realisasi (triliun rupiah)	Prosentase (%)	Alokasi Kluster 2
Bank Mandiri	55	55	100	25
Bank Negara Indonesia	55	37,4	68	25
Bank Rakyat Indonesia	55	55	100	25
Bank Tabungan Negara	25	10,3	41	-
Bank Syariah Indonesia	10	9,9	99	-
Bank DKI	-	-	-	1
TOTAL	200	167,6	84%	76

- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memiliki strategi untuk mengalihkan dana SAL & SILPA ke Perbankan untuk mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Nasional.
- Strategi pertama, Pemerintah mengucurkan dana SAL & SILPA sebesar Rp200 T ke 5 bank Himbara yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara dan Bank Syariah Indonesia yang sudah terserap sebesar Rp167,6 T (84% dari alokasi).
- Setelah itu, Pemerintah menambah injeksi dana SAL & SILPA sebesar Rp76 T kepada 3 Bank Himbara yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia serta ditambah 1 BPD yakni Bank DKI (Bank Jakarta).

Harapan Dukungan Kebijakan Untuk Industri

Dukungan Kebijakan Fiskal

Existing



Super Deduction
Tax

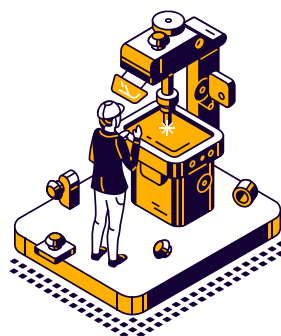


Tax Holiday



Tax Allowance

Komplementer



Accelerated Depreciation
& Investment Allowance



Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah

Dukungan Kebijakan Moneter

Existing



Kebijakan Likuiditas
Makroprudensial (KLM)



Digitalisasi Sistem
Pembayaran



Pendalaman Pasar
Keuangan

Komplementer



Hedging Support
Untuk Industri Ekspor



KLM Dengan Kearifan Lokal
& Pembangunan SDM

Kelas Menengah Indonesia: Fenomena Lipstict Effect?



Memahami Rohana, Rojali



Rohana
(Rombongan hanya nanya)



Rojali
(Rombongan jarang beli)



Kelompok Pendapatan	Rp0	Rp500.000	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp6.000.000
Kelompok Miskin	<Rp354.000				
Kelompok Rentan	Rp354.000-Rp532.000				
Kelompok Menuju Kelas Menengah	Rp532.000-Rp1.200.000				
Kelompok Kelas Menengah	Rp1.200.000-Rp6.000.000				
Kelompok Kelas Atas	>Rp6.000.000				

- Tekanan terjadi pada konsumen akibat kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen.
- Peningkatan pendapatan tidak linear dengan kenaikan harga barang yang membuat konsumen mengurangi konsumsi.
- Insentif untuk kelas menengah menjadi penting untuk menjaga daya beli.

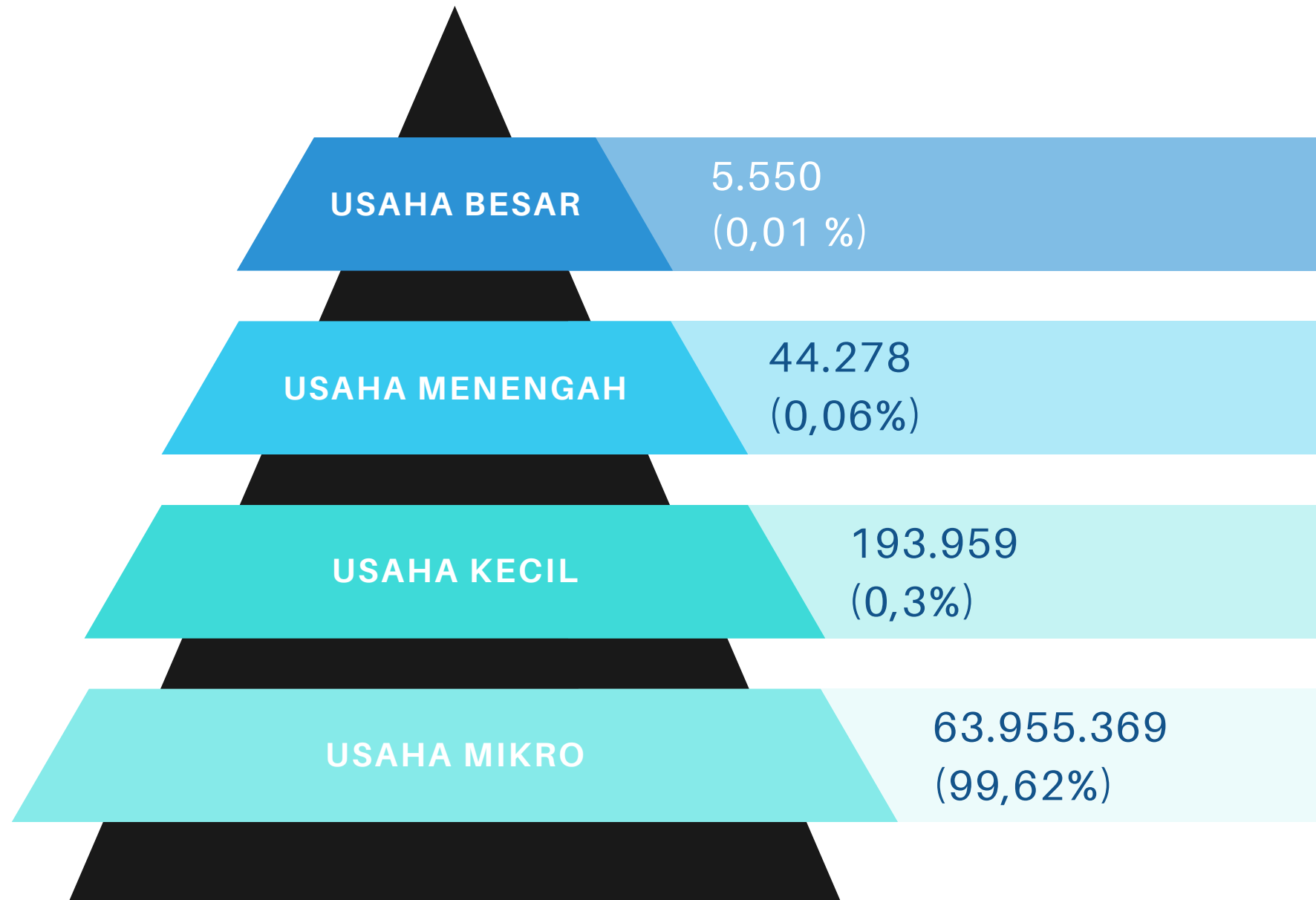
Kelas Menengah Mengalami Fenomena Mantab

Rata-rata Saldo per Rekening di Indonesia (Rp Juta)

Tahun	Rata-Rata Nasional	Kecil	Menengah-Kecil		Menengah-Besar		Besar	
		<Rp100jt	Rp100-200jt	Rp200-500jt	Rp500jt-1M	Rp1-2M	Rp2-5M	>Rp5M
2018	20,7	3,1	140,4	321,3	727,4	1.431	3.131	27.626
2019	20,1	3,0	140,3	320,2	723,1	1.423	3.125	27.293
2020	19,2	2,8	140,1	320,0	722,5	1.423	3.123	29.095
2021	19,5	2,6	140,0	318,3	719,1	1.413	3.136	31.660
2022	16,1	2,0	140,4	319,5	722,5	1.419	3.172	33.491
2023	14,9	1,9	140,6	320,0	722,3	1.421	2.323	32.329
2024	14,5	1,8	138,4	319,1	720,9	1.421	3.195	32.630
Q1-2025	14,6	1,8	140,5	319,2	719,2	1.417	3.188	33.936
Q2-2025	14,5	1,7	140,5	319,3	719,3	1.417	3.197	34.216

Tabungan masyarakat mengalami penurunan, khususnya kalangan masyarakat kecil. Fenomena "Mantab": Makan Tabungan. Namun kelas atas justru terus bertambah, mengindikasikan "precautionary saving" atau kenaikan tabungan karena ketidakpastian

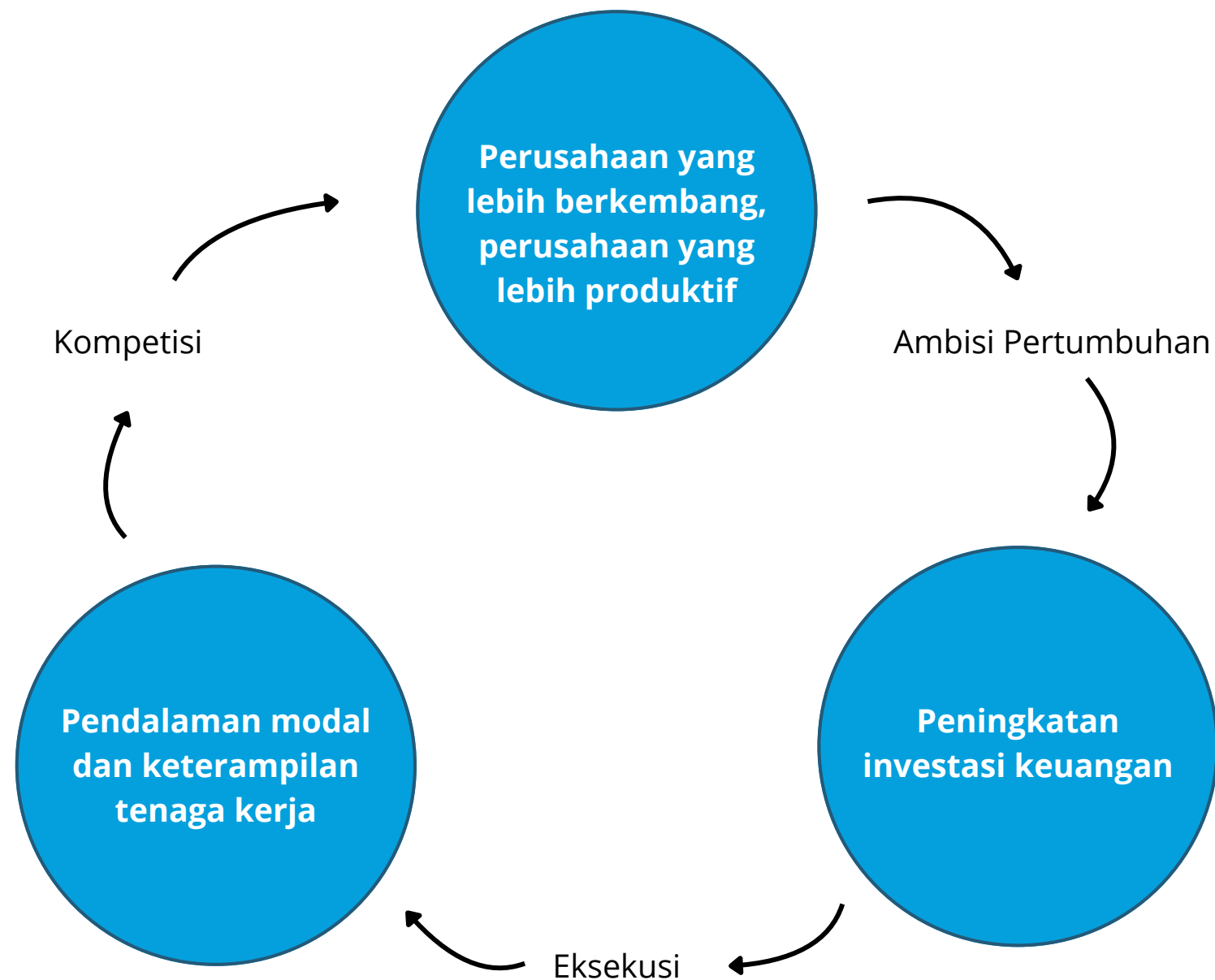
UMKM Tulang Punggung Perekonomian: Perlu Waspada



Sumber: Kementerian UMKM RI

- Piramida UMKM selama beberapa dekade tidak mengalami perubahan, hal ini mengartikan tidak adanya kemandirian UMKM untuk dapat naik kelas.
- Hal ini diduga karena UMKM sering dijadikan “komoditas politik” dimana kebijakan yang diterapkan misalnya dimana UMKM dikenakan pajak yang kecil sehingga terdapat “oknum yang memanfaatkan untuk menghindari membayar pajak (tax planning).
- Istilah UMKM sebagai backbone perekonomian nasional (60,5 persen terhadap PDB) harus diartikan sebagai kewaspadaan karena tingginya sektor informal berpotensi rentan terhadap guncangan (economics shockwaves).

Lima Jenis Modal Yang Dibutuhkan UMKM Naik Kelas



Lima Jenis Modal:

1. Modal Finansial

Untuk memfasilitasi penyaluran dan alokasi modal.

2. Modal Manusia

Pengembangan yang meningkatkan upah melalui pelatihan ulang untuk pertumbuhan, peningkatan pendidikan, dan keluarga yang sehat.

3. Modal Institusional

Melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung untuk menyederhanakan aturan serta mempercepat kemudahan berusaha.

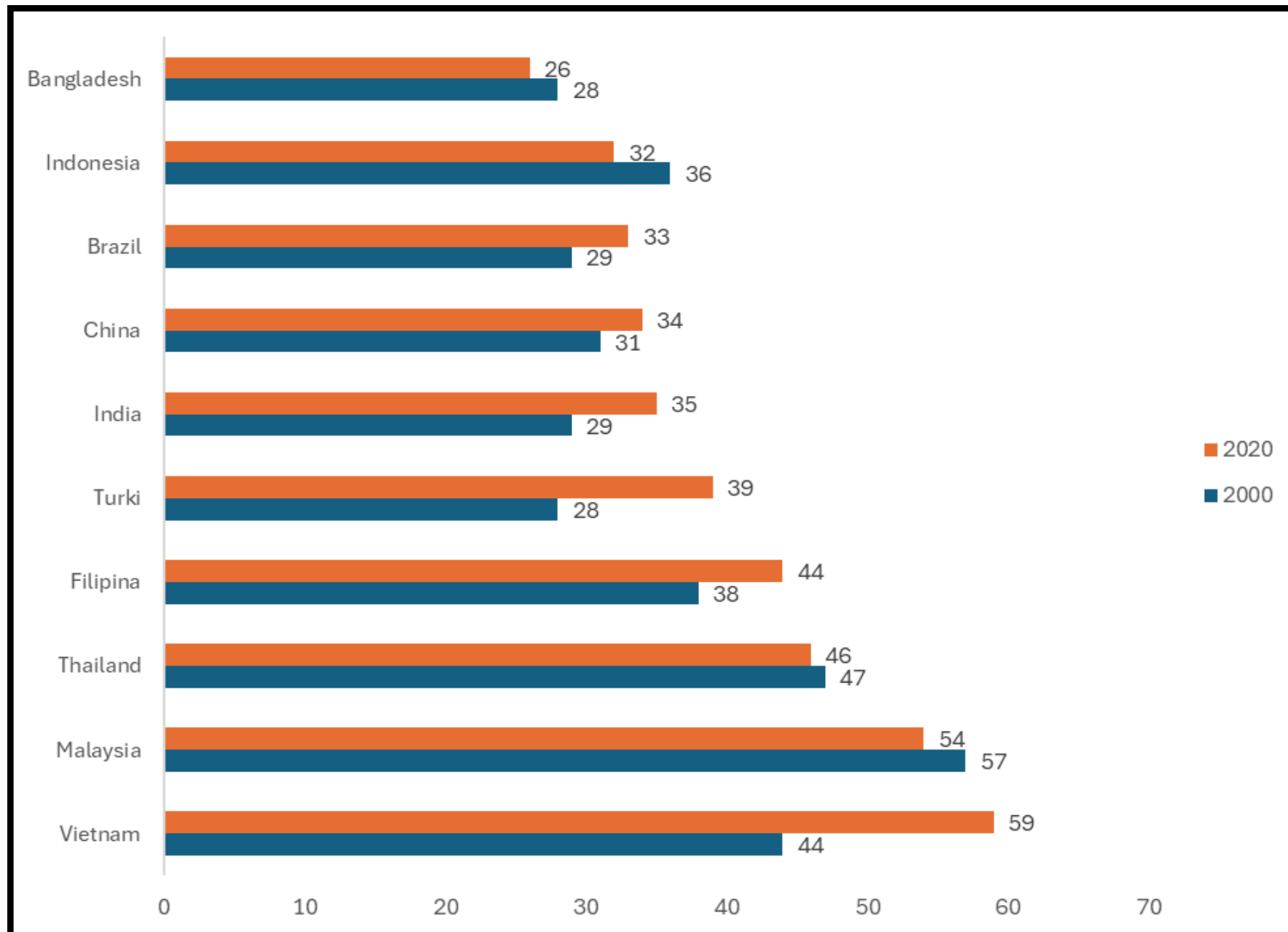
4. Modal Infrastruktur

Untuk mendukung konektivitas ekspor dan integrasi pasar domestik.

5. Modal Kewirausahaan

Untuk mendorong inovasi dan menciptakan lingkungan usaha yang dinamis.

UMKM Indonesia Lambat Menjadi Global Value Chain

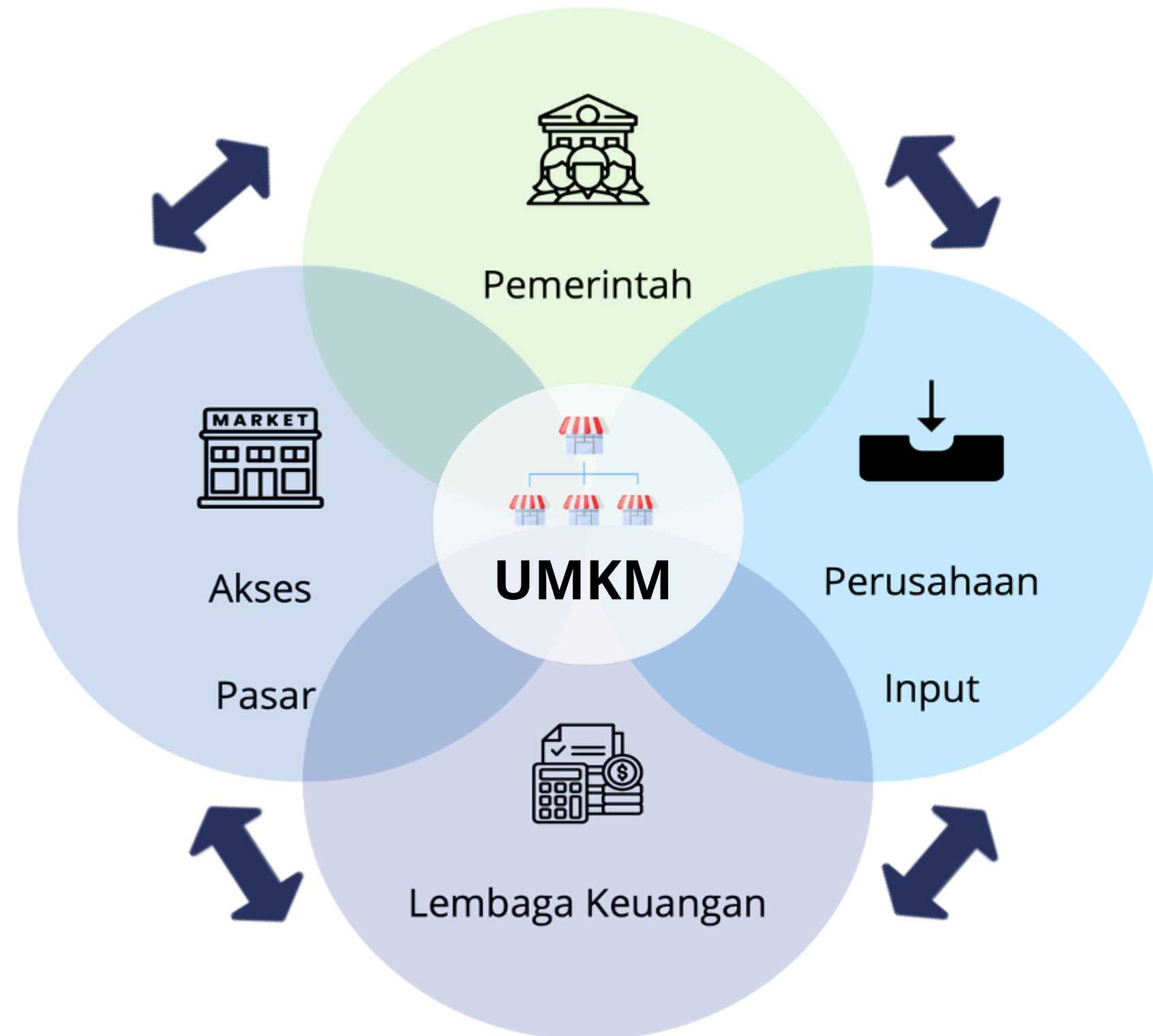


- UMKM Indonesia juga terlambat menjadi Global Value Chain (GVC) rasio UMKM Indonesia yang berorientasi ekspor hanya naik 4% selama periode 20 tahun terakhir.
- Hal ini berbeda dengan Viet Nam yang berhasil mengalami kenaikan hingga 15 persen dalam periode 20 tahun terakhir yang menjadikan pertumbuhan tinggi terjadi di Viet Nam.
- Diperlukan inovasi dalam pengembangan UMKM di Indonesia terutama dalam akses pembiayaan dimana diperlukan ekosistem inclusive closeloop untuk menjadikan UMKM sebagai ekosistem bisnis di Indonesia

Sektor Potensial 38 Provinsi Yang Dapat Didukung KLM

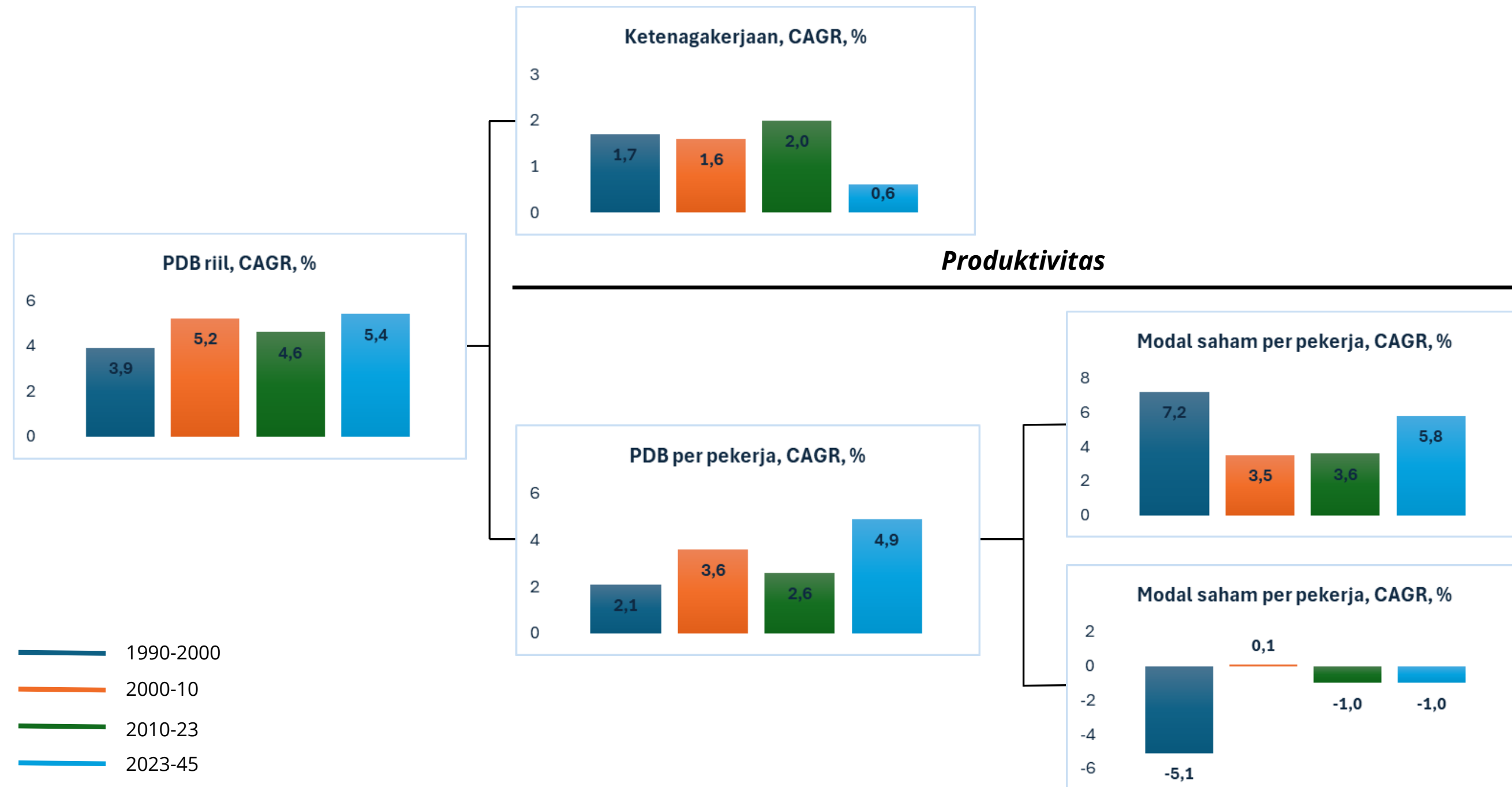
No	Provinsi	Sektor Potensial	No	Provinsi	Sektor Potensial
1	Aceh	Energi & migas, perkebunan kelapa sawit, pariwisata halal.	20	Kalimantan Barat	Perkebunan sawit, bauksit, perikanan.
2	Sumatera Utara	Perkebunan sawit & karet, pariwisata, manufaktur olahan pangan.	21	Kalimantan Tengah	Perkebunan sawit, energi, food estate.
3	Sumatera Barat	Pertanian organik, pariwisata budaya & alam.	22	Kalimantan Selatan	Pertambangan batubara, perkebunan sawit, industri hilir karet.
4	Riau	Migas, perkebunan kelapa sawit, logistik.	23	Kalimantan Timur	Migas, pertambangan batubara, industri pendukung IKN.
5	Jambi	Pertambangan batubara, perkebunan karet & sawit.	24	Kalimantan Utara	Energi hijau (PLTA Kayan), perikanan, pariwisata.
6	Sumatera Selatan	Energi, karet, sawit.	25	Sulawesi Utara	Pariwisata bahari, perikanan tuna, kelapa.
7	Bengkulu	Pertambangan batubara, perikanan, perkebunan kopi.	26	Sulawesi Tengah	Nikel, pariwisata alam, kakao.
8	Lampung	Agroindustri (gula, kopi, singkong), pariwisata pesisir.	27	Sulawesi Selatan	Pertanian, perikanan, industri semen, pariwisata seni budaya
9	Bangka Belitung	Pertambangan timah, pariwisata bahari.	28	Sulawesi Tenggara	Nikel, perikanan, pariwisata alam
10	Kepulauan Riau	Industri galangan kapal, elektronik, pariwisata Batam-Bintan.	29	Gorontalo	Jagung, perikanan, pariwisata bahari
11	DKI Jakarta	Keuangan, logistik, teknologi digital, jasa profesional.	30	Sulawesi Barat	Kakao, perikanan, perkebunan kelapa.
12	Jawa Barat	Manufaktur (otomotif, tekstil), teknologi informasi, pariwisata alam.	31	Maluku	Perikanan (lambung ikan nasional), pala, pariwisata bahari.
13	Jawa Tengah	Tekstil & garmen, mebel Jepara, pariwisata budaya dan seni	32	Maluku Utara	Nikel, pariwisata kepulauan, perikanan.
14	DI. Yogyakarta	Pendidikan, ekonomi kreatif, pariwisata.	33	Papua Barat	Migas (LNG), pariwisata Raja Ampat, perikanan.
15	Jawa Timur	Industri maritim, perikanan, pertanian hortikultura, pariwisata alam	34	Papua Barat Daya	Pariwisata bahari, perikanan.
16	Banten	Industri kimia, petrokimia, dan transportasi & logistik	35	Papua	Tambang tembaga-emas perkebunan kakao, pariwisata alam
17	Bali	Pariwisata internasional, ekonomi kreatif, pertanian organik.	36	Papua Selatan	Perikanan, perkebunan kelapa, sagu.
18	Nusa Tenggara Barat	Sport Tourism, pertambangan (tembaga), perikanan.	37	Papua Tengah	Pertambangan (tembaga, emas), perkebunan.
19	Nusa Tenggara Timur	Peternakan sapi, pariwisata bahari, energi terbarukan (angin, surya)	38	Papua Pegunungan	Pariwisata alam, hortikultura dataran tinggi.

Konsep Inclusive Closeloop Dalam Mendukung UMKM



- Strategi ini diharapkan dapat membangun ekosistem kemitraan yang **terbuka, adil, dan berkelanjutan, dengan berkolaborasi dan bekerja sama antar multi-stakeholder**, seperti pemerintah, sektor swasta, UMKM, atau stakeholder lainnya.
- UMKM sering terbentur saat mengajukan pinjaman ke bank, karena banyak persyaratan dari bank yang sulit dipenuhi seperti terkait izin usaha, pembayaran pajak, pencatatan kas keuangan dan lain sebagainya.
- Permasalahan UMKM di Indonesia adalah **permodalan, marketing, infrastruktur, akses dan kemampuan mengakses teknologi, serta rendahnya literasi dan inklusi keuangan**.
- UMKM di Indonesia hanya sebesar **4,1%** yang menjadi global value chain.

Produktivitas SDM Indonesia Rendah: Indonesia Cemas?



- Pada periode waktu tahun 2010-2023, pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh sebesar 4,6 persen.
- Bahkan diperkirakan produktivitas tenaga kerja Indonesia akan mengalami penurunan hanya sebesar 0,6 persen pada tahun 2023-2045
- PDB per pekerja pun juga mengalami penurunan pada tahun 2010-2023 maka isu kesejahteraan menjadi permasalahan.

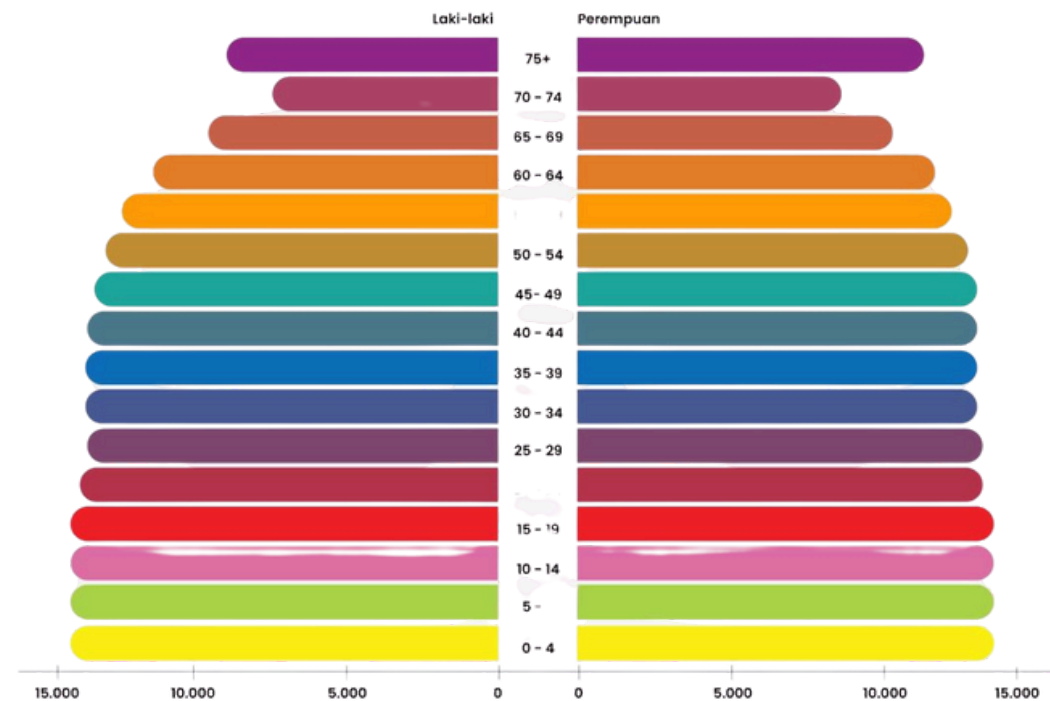
Kebijakan Harus Memerhatikan Faktor Demografi

1.606.562



282.477.584

Penduduk Indonesia Tahun 2024



Keterangan	Jumlah Penduduk
Pulau Jawa	157.393.610
Pulau Sumatera	61.583.691
Pulau Sulawesi	20.783.350
Pulau Kalimantan	17.454.078
Bali dan Nusa Tenggara	15.711.214
Pulau Papua	5.649.552
Pulau Maluku	3.084.148

- Penduduk Indonesia yang mulai didominasi oleh generasi produktif harus diorkestrasi dengan baik untuk memanfaatkan bonus demografi dengan baik.
- Penduduk Indonesia yang masih terus mengalami peningkatan harus dijadikan momentum untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Berkualitas untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Pemerintah mulai harus memerhatikan pengambilan kebijakan yang responsif dan disesuaikan dengan kebutuhan generasi ke depan
- Investasi terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan digital services dapat dilakukan untuk menggerakkan perekonomian ke depan dan memanfaatkan bonus demografi serta mencegah bencana demografi.

Tenaga Kerja Indonesia Didominasi Oleh Pekerja Mandiri

Sektor	Deskripsi	Pekerja Mandiri	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Total
Pertanian	Pertanian, peternakan, perikanan	28,9	<0,1				29
Manufaktur	Manufaktur	2,3	5,8	2	1,4	4,6	16
Sumber Daya	Pertambangan dan penggalian	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	1
	Listrik, gas, uap, dan AC	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
	Air bersih	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
Jasa	Konstruksi	<0,1	1	1,6	0,4	0,8	54
	Perdagangan besar dan eceran	8,3	10,2	1,7	0,8	1,7	
	Transportasi dan pergudangan	1,2	0,4	0,4	0,2	0,3	
	Akomodasi dan penyediaan makanan &	3,1	3,4	0,7	0,3	1	
	Informasi dan komunikasi	0,5	0,3	0,3	0,1	0,2	
	Keuangan dan asuransi	<0,1	0,4	0,7	0,4	0,2	
	Real estat	0,4	<0,1	0,1	0,1	0,2	
	Profesional, ilmiah, dan teknis	0,5	0,2	0,5	0,3	0,3	
	Administrasi dan layanan pendukung	<0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	
	Pendidikan	<0,1	1,5	3,6	0,4	0,1	
	Kesehatan dan pekerjaan sosial	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	
	Seni, hiburan, dan rekreasi	0,6	0,1	0,3	0,1	0,2	
	Aktivitas jasa lainnya	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	
Total		46	25	12	6	11	100

Danantara Sebagai Lembaga Liquidity Provider



- Dibentuknya BPI Danantara menjadi katalis positif bagi investor dan pasar global karena selama ini BUMN dinilai sering memberikan “sinyal ganda” sebagai pelaku dan juga regulator dalam perekonomian.
- BPI Danantara yang mengelola US\$600 Billion akan menjadi SWF terkuat nomor 8 dunia.
- Namun tata kelola BUMN di Danantara saat ini perlu dilakukan perbaikan tata kelola karena birokrasi yang ada membuat investasi BUMN menjadi terhambat

Sumber: *Sovereign Wealth Fund Institute*

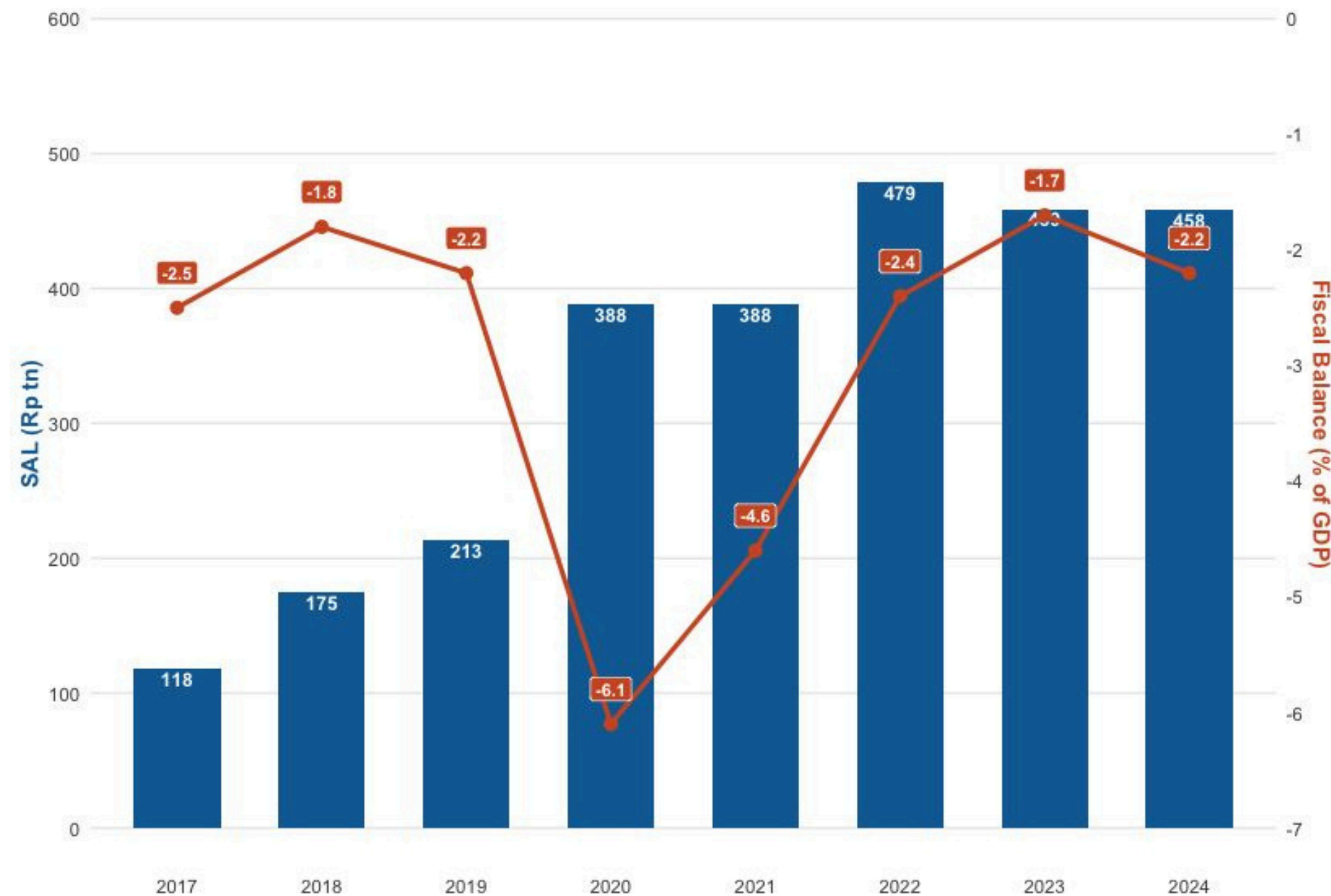


Terima Kasih

Dr. Aviliani

Ekonom Senior INDEF

Pemanfaatan SAL & SILPA: Solusi Jangka Pendek



- SAL dan SILPA dapat menjadi “fiscal buffer” untuk menutup kekurangan kas tanpa perlu langsung menambah utang atau menambah Surat Berharga Negara (SBN).
- Solusi menutup defisit jangka pendek dan menjaga likuiditas APBN dari SAL dan SILPA menjadi menarik karena bergerak dalam tren penurunan sejak pandemi COVID-19.
- Namun, dana ini bisa dialirkan kembali ke program prioritas nasional terutama yang bersifat padat karya untuk mendorong konsumsi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Dampak Dari Injeksi Dana SAL & SILPA Ke HIMBARA

1ST Round Effect

INJEKSI DANA SAL & SILPA
Rp200 T

Himbara

Kredit

Bunga ↓
Permintaan ↑

Deposito

Bunga ↓
Permintaan ↓

2ND Round Effect

Swasta

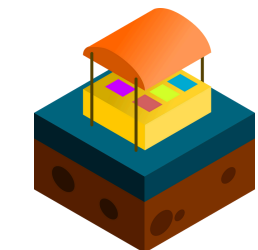
Kredit

Bunga — ↓
Permintaan ↓

Deposito

Bunga — ↓
Permintaan ↑

3RD Round Effect



Sektor riil ↑



Konsumsi ↑

Perlu di mitigasi



NPL ↑



Inflasi ↑

Cost of Fund ↓

Likuiditas ↑

..... = spillover — ↓ = tetap cenderung menurun

Dampak Dari Injeksi Dana SAL & SILPA Ke BPD

1ST Round Effect

INJEKSI DANA SAL & SILPA

BPD

Dana tabungan

Likuiditas ↑

Reverse Dana Simpanan ↓

Kredit
Bunga ↓
Permintaan ↑

Deposito
Bunga ↓
Permintaan ↓

2ND Round Effect

Pemerintah Daerah

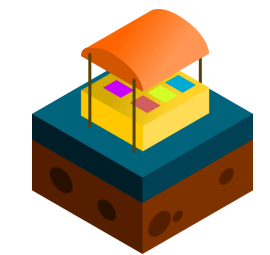
APBD

Cost of Fund ↓

Belanja
Alokasi ↑
Serapan ↑

Investasi
PMTB ↑
Badan Usaha ↑

3RD Round Effect



Sektor riil ↑



Konsumsi ↑

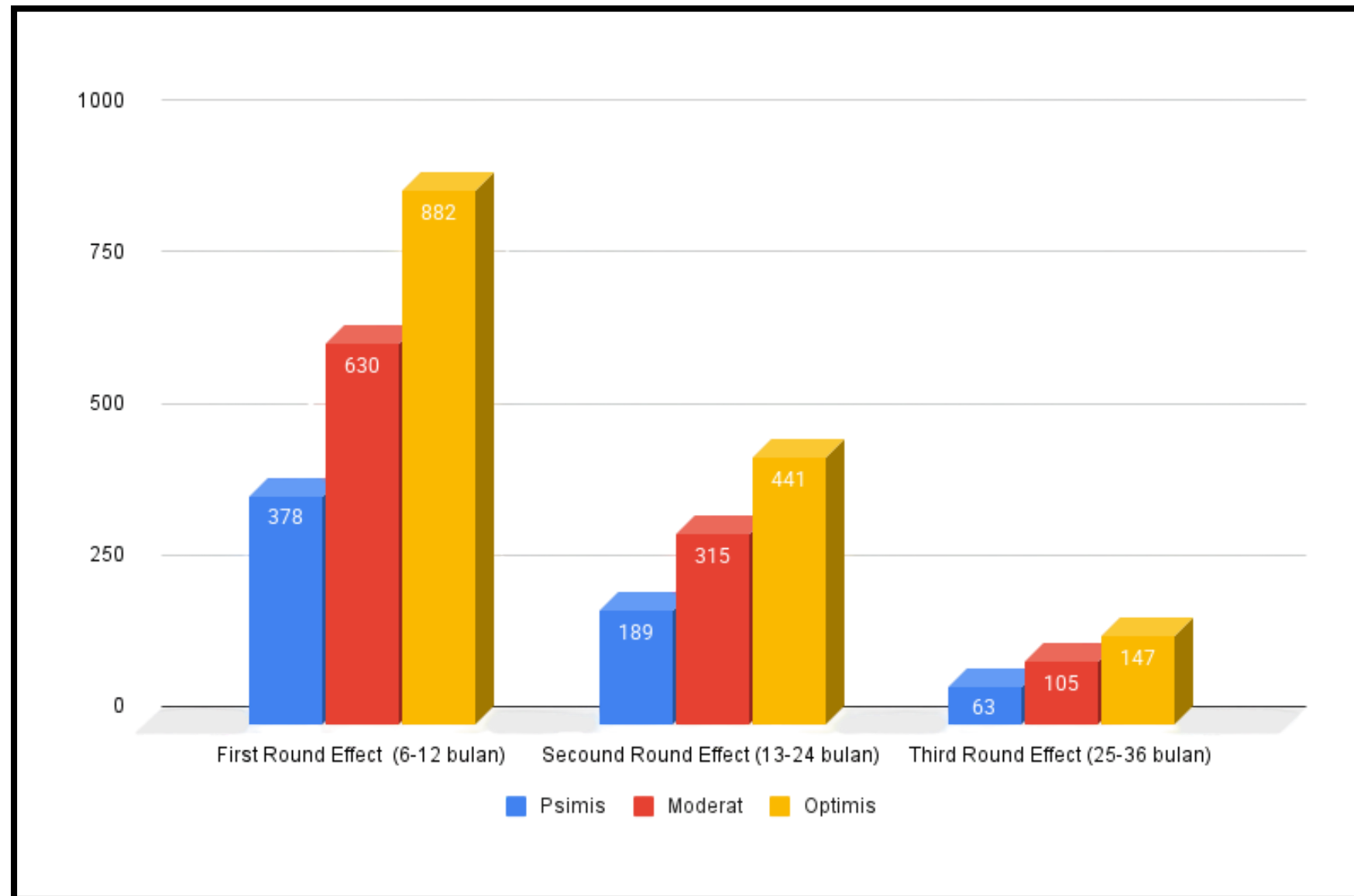


Perputaran Uang ↑

..... = spillover

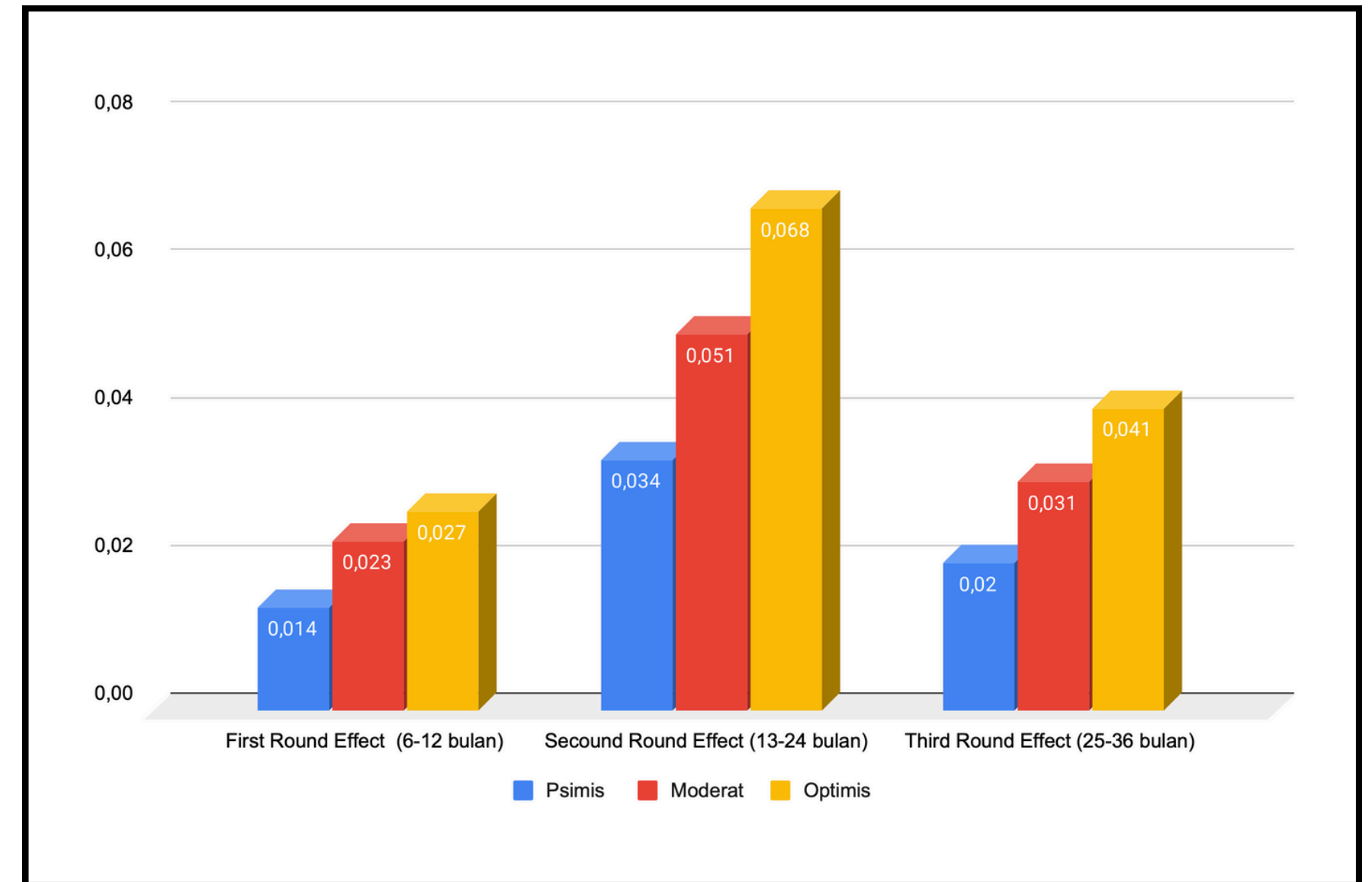
Dampak Dari Kebijakan Injeksi SAL & SILPA Tahap 1

Proyeksi Kebijakan SAL & SILPA terhadap Liquidity Expansion



Kebijakan injeksi SAL & SILPA sebesar Rp200 T akan memberikan dampak terhadap liquidity expansion untuk jangka pendek (first round effect) hingga Rp882 T pada skenario optimis, tetapi akan melambat dalam periode tahun ketiga (third round effect) hingga Rp147 T.

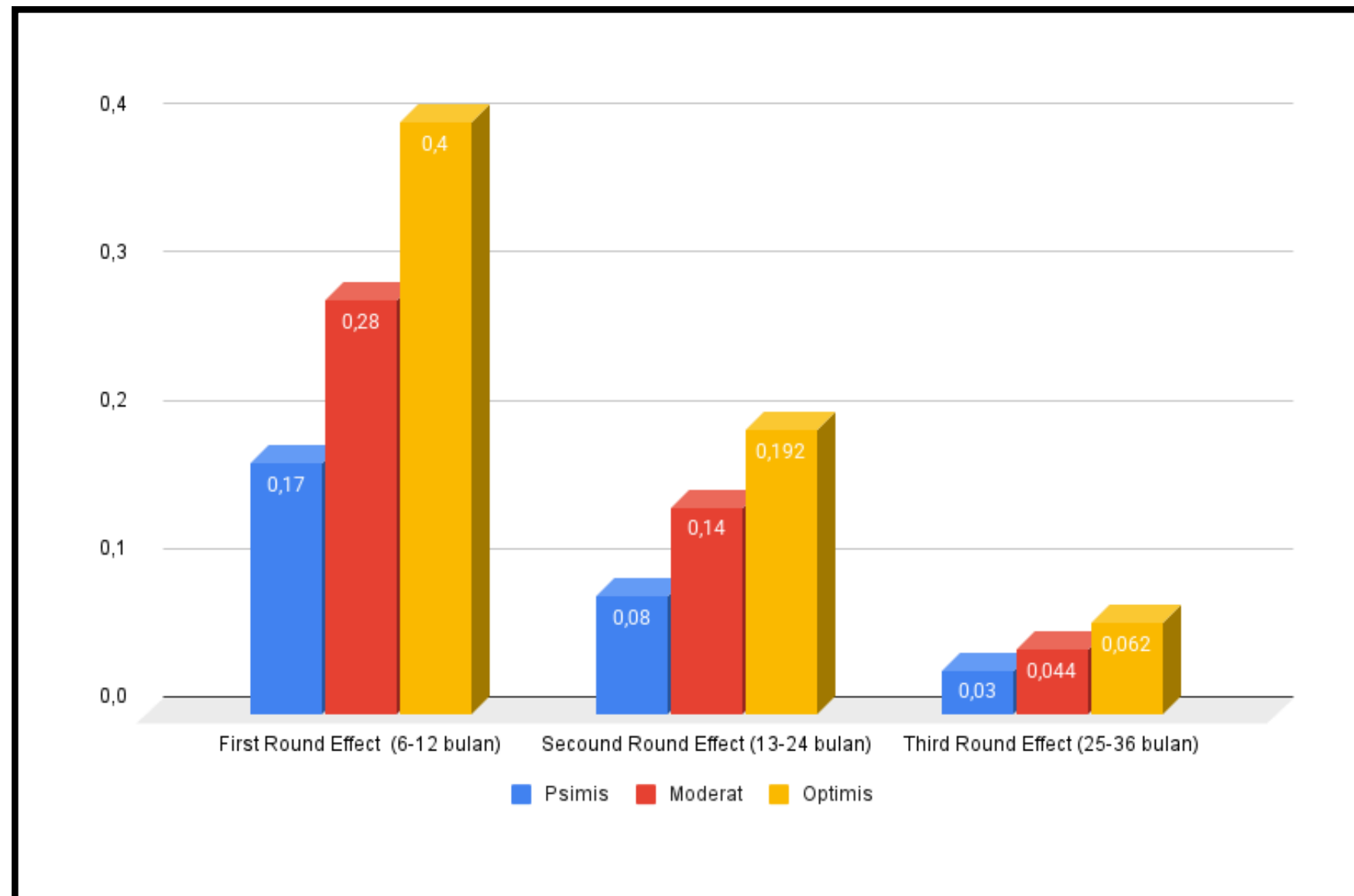
Proyeksi Kebijakan SAL & SILPA terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi



Kebijakan injeksi SAL & SILPA sebesar Rp200 T akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi untuk jangka pendek (first round effect) menjadi 5,39% pada skenario optimis tetapi akan terus tumbuh dalam periode tahun ketiga (third round effect) hingga 5,53%

Dampak Dari Kebijakan Injeksi SAL & SILPA Tahap 1

Proyeksi Kebijakan SAL & SILPA terhadap Inflasi



- Kebijakan injeksi likuiditas dari SAL & SILPA sebesar Rp200 T tidak membuat dampak signifikan terhadap inflasi.
- Dari model yang diestimasi hanya akan berdampak 0,17 persen (skenario psimis) dan 0,4 persen (skenario optimis) dengan baseline inflasi Agustus 2025 sebesar 2,31 persen sehingga inflasi akan berada di kisaran 2,48 - 2,71 persen pada periode 6-12 bulan ke depan.
- Injeksi dana SAL & SILPA ini akan meningkatkan inflasi dalam jangka pendek karena potensi peningkatan konsumsi domestik tetapi akan melambat pada periode 25-36 bulan (third round effect).

Perbandingan Kebijakan GWM Di Beberapa Negara

Negara	Giro Wajib Minimum	Catatan
Amerika Serikat	6.2%	Required Reserve Ratio (RRR) from PBoC
India	0%	Fed set reserve requirement ratio to 0% since March 2020
China	3.75%	Cash Reserve Ratio (CRR) on Net Demand & Time Liabilities
Indonesia	9%	Reserve Requirement Ratio (Giro Wajib Minimum / GWM)
Vietnam	3%	RRR for commercial banks (VND deposits < 12 months)
Singapura	3%	Minimum Cash Balance (MCB) of Qualifying Liabilities (not a formal RRR)

Sumber : CEIC, 2024

Dua model kebijakan:

- Tanpa RRR (Required Reserve Ratio) tradisional → AS & Singapura lebih mengandalkan kerangka pasar & instrumen Basel III.
- Dengan RRR (Required Reserve Ratio) tinggi/rendah → China, India, Indonesia, Vietnam masih menjadikannya instrumen moneter utama.

Asia cenderung masih mempertahankan RRR (Required Reserve Ratio), dengan variasi:

- China & Indonesia → tinggi.
- India & Vietnam → relatif rendah.

Tren global: negara maju cenderung meninggalkan RRR (Required Reserve Ratio) → beralih ke kerangka likuiditas berbasis risiko (LCR/NSFR).

Perbandingan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial

Negara	Instrumen Utama	Minimum / Catatan	Berlaku Sejak
Amerika Serikat	Liquidity Coverage Ratio (LCR); Net Stable Funding Ratio (NSFR)	LCR = 100% untuk bank besar; NSFR = 100%	LCR (2014), NSFR (Juli 2021)
India	LCR; NSFR	LCR 100% (Januari 2019); NSFR 100% (Oktober 2021)	LCR (2014), NSFR (2018 panduan, penuh 2021)
China	LCR; NSFR (CBIRC/NFRA)	Keduanya 100% untuk bank besar	LCR (2018), NSFR (2020)
Vietnam	Circular 22/2019: maksimal 30% dana jangka pendek boleh dipakai untuk kredit menengah/panjang (berlaku 2020, turun jadi 30% sejak 2022).	Maksimum 30% (sejak 2020)	Berlaku Jan 2020
Singapura	MAS Notice 649 (LCR & Minimum Liquid Assets); MAS Notice 652 (NSFR)	LCR 100% untuk bank signifikan; NSFR 100%	Notice 649 (2014, amandemen 2023), Notice 652 (2019, amandemen 2021)
Indonesia	Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) (BI); LCR (POJK 42/2015, amandemen 19/2024); NSFR (POJK 50/2017, amandemen 20/2024)	LCR = 100%; NSFR = 100%; PLM \approx 6% dari DPK	PLM (2018, kalibrasi 2021/2023); LCR (2015); NSFR (2017)

Sumber : Berbagai macam sumber

Basel III memperkenalkan dua standar likuiditas global:

- Liquidity Coverage Ratio (LCR) → bank wajib memiliki High Quality Liquid Assets (HQLA) \geq 100% dari arus keluar kas 30 hari.
- Net Stable Funding Ratio (NSFR) → bank wajib menjaga pendanaan stabil \geq 100% dari kebutuhan pendanaan jangka panjang.

Keduanya ditujukan untuk mengurangi risiko krisis likuiditas setelah GFC 2008.

Adopsi Basel III di Beberapa Negara

- Negara maju (AS, Singapura, China) → adopsi Basel III penuh, menjadikan LCR/NSFR pilar utama stabilitas likuiditas.
- India → adopsi penuh tapi relatif terlambat (NSFR baru efektif 2021).
- Vietnam → belum Basel III; gunakan rasio domestik (30%) sebagai substitusi NSFR/LCR.
- Indonesia → adopsi Basel III, tapi tambahkan instrumen lokal (PLM) untuk kalibrasi sesuai kebutuhan domestik.
- Pola global → Basel III jadi standar utama, tapi di Asia Tenggara (Vietnam, Indonesia) terlihat variasi lokal untuk menyeimbangkan stabilitas & kebutuhan pertumbuhan.